

LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT IPSDH

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang berdayaguna dan berhasilguna, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berkomitmen terus mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan sistem akuntabilitas yang berbasis kinerja.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024. Penyusunan Laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Semoga laporan ini bermanfaat.



Jakarta, 16 Januari 2025

Pt. Direktur,

Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE.

NIP.19650416 199103 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. SUMBER DAYA MANUSIA	3
D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. RENCANA STRATEGIS.....	6
B. RENCANA KERJA TAHUN 2024.....	10
C. ANGGARAN	11
D. PERJANJIAN KINERJA	13
E. POHON KINERJA.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. CAPAIAN KINERJA	15
B. EFEKTIFITAS KINERJA	17
C. EFISIENSI CAPAIAN KINERJA	18
D. PROGRES CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2020-2024	21
E. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	22
F. REALISASI ANGGARAN.....	56
G. PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA	61
BAB IV PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

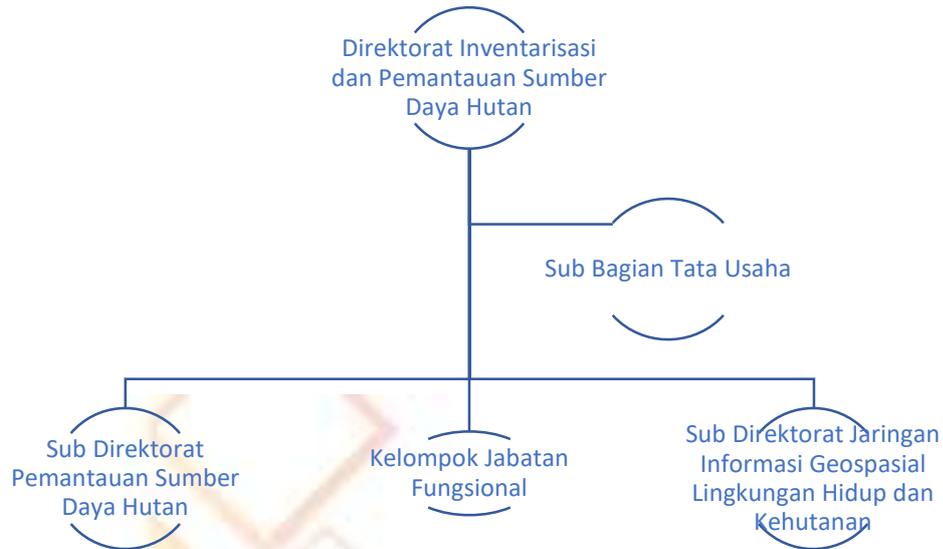
A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan prasyarat tercapainya seluruh prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal alokasi sumberdayalah dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktifitas pembangunan nasional. Arah kebijakan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam melaksanakan peran tersebut adalah dengan mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah. Upaya untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut perlu didukung oleh data dan peta sumberdaya hutan yang terkini. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berperan dalam penyediaan data dan peta sumber daya hutan terkini melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta peningkatan keterbukaan data dan peta sumber daya hutan sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagai bahan acuan dan evaluasi kebijakan.

Peran dan fungsi tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024 yang berisi target dan indikator outcome yang harus dicapai selama 5 tahun. Target dan indikator untuk tahun 2024 telah dijabarkan dalam Rencana Kerja 2024 dan diikrarkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya maka Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaantugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berdasarkan Permenlhk No. 15 tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 15/MENLHK-II/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas “melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan”. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan

pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan

penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dibidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan serta jaringan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan

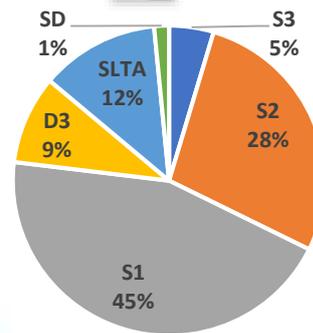
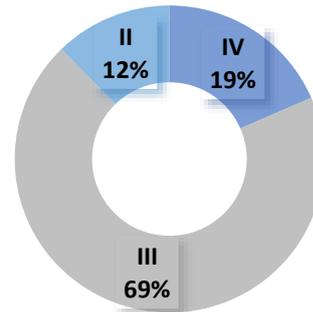
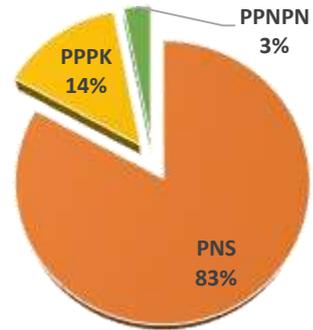
pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat

C. SUMBER DAYA MANUSIA

SDM
Direktorat IPSDH



Jumlah pegawai lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sampai dengan bulan Desember 2024 berjumlah 65 orang yang terdiri dari 35 pegawai Laki-laki dan 30 pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaianya terdapat 54 PNS (83%), 9 PPPK (14%), dan 2 PPNPN (3%). Dari 65 Pegawai berdasarkan golongannya terdiri dari 12 Golongan IV, 45 Golongan III dan 8 Golongan II.



Tabel 1. Tabel Sebaran Jumlah Pegawai Tahun 2024

No	Direktorat/ Sub Direktorat/ Sub Bagian	Gender		Status Kepegawaian		
		L	P	PNS	PPPK	PPNPN
1	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	0	1	0	0
2	Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan	18	19	34	3	0
3	Sub Direktorat Jaringan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8	8	14	2	0
4	Sub Bagian Tata Usaha	7	4	5	4	2
Jumlah		34	31	54	9	2
		65		65		

D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan adalah:

1. Reorganisasi KLHK

Adanya reorganisasi KLHK yang dimandatkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kehutanan yaitu pemisahan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan

i. Penerbitan Peta dan SK PIPPIB pada Tahun 2024 ini belum dapat mencapai target dikarenakan terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan sehingga diperlukan penerbitan Instruksi Presiden dengan SOTK baru yang menjadi dasar terbitnya SK PIPPIB. Hingga akhir tahun 2024 ini penerbitan SOTK baru masih dalam proses sehingga penerbitan Peta dan SK PIPPIB Tahun 2024 masih belum dapat diproses lebih lanjut;

ii. Permasalahan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat IPSDH bersifat khusus, karena jenis pekerjaannya beragam dan tidak monoton serta sangat berkaitan dengan teknologi dan inovasi.

1. Mengingat perannya sebagai Walidata Geospasial LHK, maka SDM yang sangat terkait dengan basis data dan urusan Teknologi Informasi (TI) amat sangat diperlukan;
2. Mengingat perannya dalam inventarisasi hutan secara terrestrial dan non-terrestrial, maka pengembangan SDM yang terkait urusan survey dan pemetaan, menjadi sangat penting. Dalam hal ini optimalisasi jabatan fungsional Survey dan Pemetaan (Surta) perlu menjadi prioritas.

iii. Keberlangsung Inventarisasi Sumber Daya Hutan

Inventarisasi hutan adalah dasar dari segala kebijakan di sektor kehutanan,

untuk itu penguatan urusan inventarisasi harus terus menjadi prioritas. Bagian inventarisasi tidak boleh menjadi tempelan atau tidak menjadi prioritas dalam pengelolaan SDH. Untuk itu, jaminan bahwa anggaran IHN tidak menjadi bagian yang paling mudah dipotong, harus dikomitmenkan;

iv. Data nasional versus data global

Pemahaman tentang bagaimana data nasional dibangun dan perbedaan serta masalahnya apabila disamakan dengan data global, adalah hal sangat penting. Jangan sampai ketidakpahaman terhadap data nasional, membuat data nasional tidak ada kekuatannya melawan data global.

v. Keberlangsungan penyelenggaraan informasi geospasial LHK

Pada saat ini KLHK adalah salah satu Kementerian terdepan yang telah berhasil menyelenggarakan tata kelola data dan informasi geospasial secara baik dan mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, jaminan pengelola data dan informasi geospasial KLHK memahami peran tersebut dan terus mengembangkannya sesuai dengan peta jalan yang telah dibangun, perlu dipertahankan dan bahkan dikembangkan.

vi. Urgensi valuasi sumber daya hutan

Tahapan yang paling penting setelah mengoptimalkan inventarisasi hutan adalah tentang membangun metode valuasi sumber daya hutan. Saat ini valuasi SDH yang ada belum berhasil mencerminkan peran SDH yang tangible. Jasa ekosistem yang lebih banyak dikembangkan adalah terkait isu carbon. Padahal peran SDH tidak hanya terbatas pada carbon, namun lebih dari itu.

vii. Keberlanjutan pembangunan zona integritas

Pembangunan ZI bukanlah hanya untuk memenuhi target-target RB, namun sesungguhnya adalah untuk bisa mencapai tujuan-tujuan organisasi secara efektif, efisien dan optimal. Terkait hal ini, maka pembangunan ZI perlu terus dilanjutkan. Evaluasi terhadap kurang berhasilnya evaluasi WBBM perlu dilakukan, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya penilaian untuk WBBM. Dalam hal ini komunikasi dan koordinasi dengan Inspektorat LHK dan PANRB untuk mendapatkan evaluator yang lebih memahami peran pelayanan Informasi Geospasial, perlu dilakukan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi dan Misi Ditjen PKTL disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, Visi Ditjen PKTL yaitu: Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional dalam mendukung Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat. Di dalam Rencana Strategis Ditjen PKTL 2020- 2024 Tupoksi Ditjen PKTL dijabarkan dalam 3 Program, yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
- 2) Program Kualitas Lingkungan Hidup
- 3) Program Dukungan Manajemen.

Sejalan dengan Renstra Ditjen PKTL 2020-2024, tugas dan fungsi DirektoratIPSDH mendukung Ditjen PKTL dalam mewujudkan **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen**. Guna mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut, dalam Renstra Direktorat IPSDH 2020-2024 telah ditetapkan kegiatan, sasaran dan output sebagaimana terinci pada tabel berikut. Target ini telah mengalami perubahan dari Renstra awal sesuai dengan konsep Revisi Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020-2024.

Tabel 2. Target Renstra Direktorat IPSDH berdasarkan IKP Ditjen PKTL 2020-2024

Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
<i>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</i>								
Meningkatkan pelayanan data dan informasi Sumberdaya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Layanan	32	32	33	33	33	33
<i>Program Dukungan Manajemen</i>								
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di	Nilai SAKIP Dtijen PKTL	Poin	79	80	81	82	80	80

Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3	3
	Laporan Keuangan Ditjen PKTL	Dokumen	1	1	1	1	1	1
	Nilai NKA Ditjen PKTL	Poin	-	-	-	-	82.5	82.5

Tabel 3. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Output Kegiatan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan
				Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan
				Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
			Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Data dan Informasi Deforestasi Indonesia
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahandi Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Kondisi birokrasi dan layanan public yang agile,efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP Ditjen PKTL
				Level Maturitas SPIP
				Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
				Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Output Kegiatan
			Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sasaran kegiatan **Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH dan Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK** ditetapkan untuk mendukung Sasaran program **Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan**. Dengan dukungan output kegiatan tersebut diharapkan penetapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan dapat dicapai agar mampu menghadapi tantangan ke depan.

Adapun target capaian Kinerja Kegiatan dalam Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Target Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan Kawasan hutan	Dokumen	3	3	3	3	3	15
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Laporan	1	1	2	2	2	8
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	SK & Peta	2	2	2	2	2	10
	Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	Dokumen	1	1	1	1	1	5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	Laporan	1	1	1	1	1	5
Meningkatnya Kondisi birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	80	80
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Level	3	3	3	3	3	3
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	5
Meningkatnya Pengeolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Poin	-	-	-	-	82.5	82.5

B. RENCANA KERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan utama pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan 2020-2024, kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024 mencakup 2 (dua) kegiatan yaitu Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi sumber daya hutan
2. Tersedianya layanan informasi Geospasial Tematik LHK
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

Secara rinci rencana kegiatan tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2024

Kegiatan /Sasaran Kegiatan	IKK/RO	Unit Kegiatan (Komponen)	Target 2024
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	3 Dokumen
		052- Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan	

		Lahan Nasional	
	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 Sk dan Peta
		052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	
	006-Data dan informasi deforestasi	051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1 Dokumen
		052-Penyusunan Buku Deforestasi Indonesia	
	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	051-Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Laporan
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	051-Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Laporan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen PKTL			
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan public yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP Ditjen PKTL		
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel		
	962-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	061-Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1 Layanan
	994-Layanan Perkantoran	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan
Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		

C. ANGGARAN

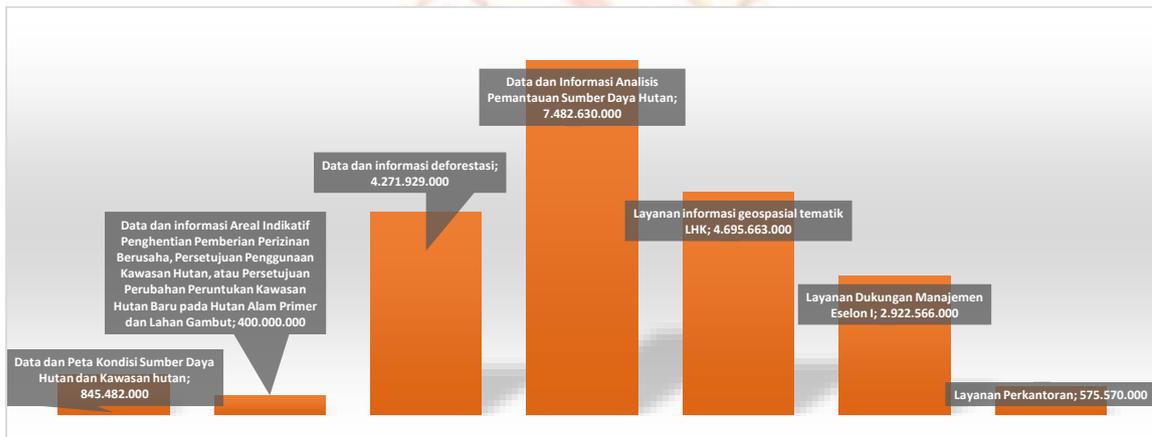
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan merupakan bagian dari Satker Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN No. DIPA-029.06.1.466100/2024 tanggal 24 November 2023 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp21.193.840.000,- dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp17.695.704.000
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Rp 3.498.136.000
Jumlah	Rp21.193.840.000

Anggaran tersebut merupakan revisi terakhir sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Perubahan) dan POK Revisi 16 tanggal 23 Desember 2024.



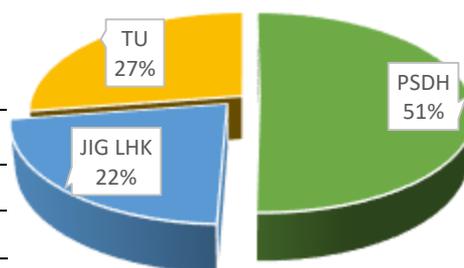
Gambar 2. Perkembangan Perubahan Anggaran Tahun 2024



Gambar 3. Alokasi Anggaran Per-IKK Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024

Tabel 6. Alokasi Anggaran Per Sub Direktorat/Bagian Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024

SUB DIT./ SUB BAGIAN	PAGU TAHUN2024	PERSEN ANGGARAN
PSDH	10.689.861.000	50,44
JIG LHK	4.695.663.000	22,16
TU	5.808.316.000	27,41
JUMLAH	21.193.840.000	100,00



Tabel 7. Alokasi Anggaran Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Jumlah Biaya
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	845.482.000
		052- Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	1 Dokumen	322.198.000
		052- Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Peretujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	1 Layanan	523.284.000
	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Peretujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Peretujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Peretujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 SK dan Peta	400.000.000
		052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Peretujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Peretujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	1 Layanan	300.000.000
		051-Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Laporan	100.000.000
		051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1 Dokumen	4.271.929.000
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	006-Data dan informasi deforestasi	051-Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Laporan	4.271.929.000
		051-Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Laporan	7.482.630.000
Meningkatnya Kondisi birokrasi dan layanan public yang agile,efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	051-Layanan informasi geospasial tematik LHK	1 Laporan	7.482.630.000
		061-Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH Eselon I	1 Layanan	4.695.663.000
	962-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	061-Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH Eselon I	1 Layanan	3.498.136.000
		002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor Perkantoran	1 Layanan	2.922.566.000
Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lngkungan	994-Layanan Perkantoran	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor Perkantoran	1 Layanan	575.570.000
		Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lngkungan		

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab.

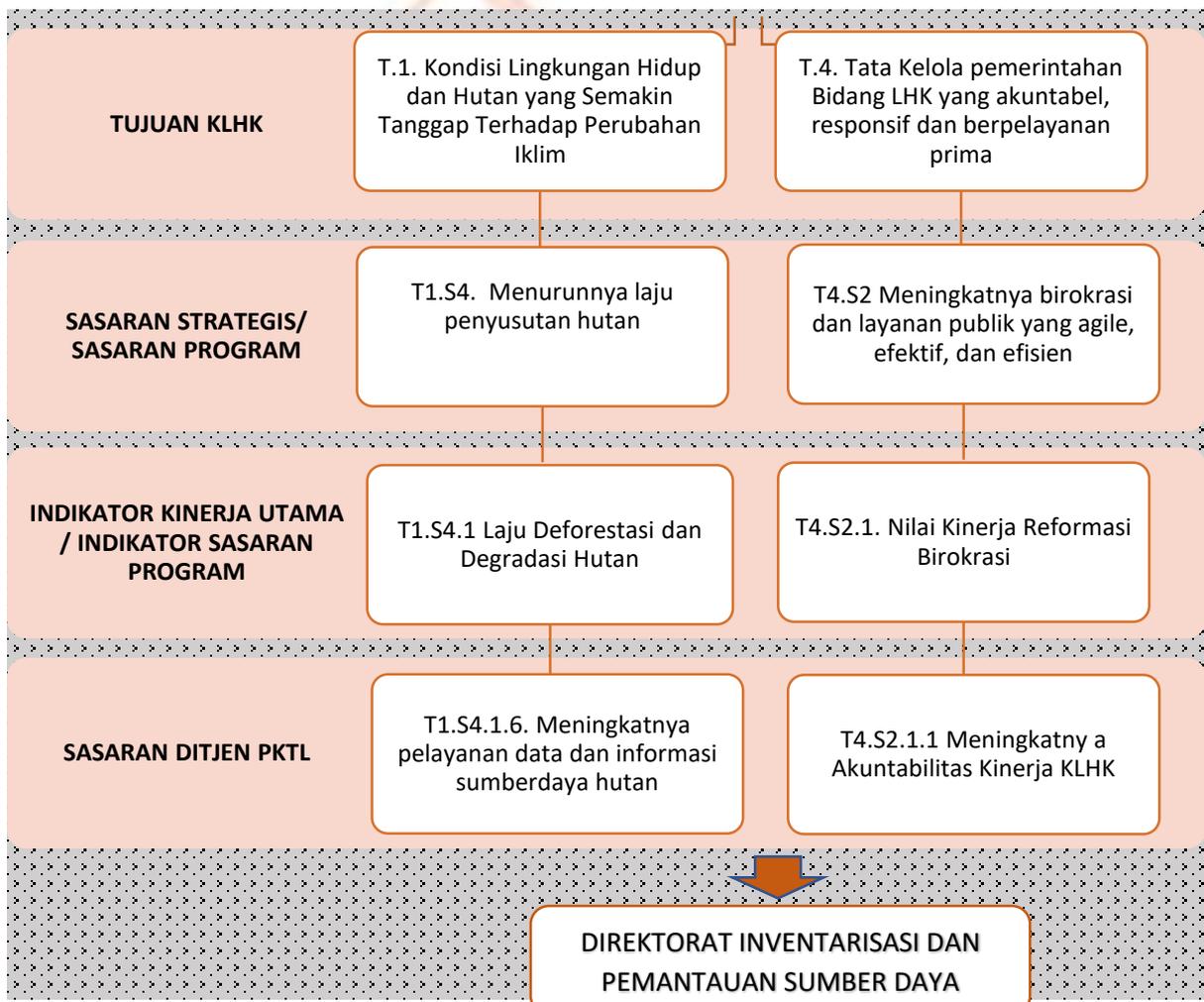
Selama periode 2024 Direktorat IPSDH telah 1 (satu) kali mengalami penyesuaian Perjanjian Kinerja pada bulan Desember 2024, penyesuaian ini terjadi dikarenakan adanya penyesuaian target IKK pada Direktorat IPSDH.

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		
				SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi sumber daya hutan	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan Kawasan hutan	3	3	Dokumen
			Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2	2	Laporan
			Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	2	SK dan Peta
			Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	1	1	Dokumen
		Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1	1	Laporan
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	80	80	Poin

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		
				SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
			Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen
		Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	98,29	82,5	Poin

E. POHON KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kegiatan dan keluaran (output) yang ingin dicapai selama tahun 2024. Mengacu pada Renstra Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Renja Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 maka kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2024 yang diukur kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		052- Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 SK dan Peta	2 SK dan Peta	100
		052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan	1 Layanan	1 Layanan	100

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
		Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut			
	006-Data dan informasi deforestasi	051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	051-Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Laporan	1 Laporan	100
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	051-Layanan informasi geospasial tematik LHK	051-Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP Ditjen PKTL		80 Poin		
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		3 Level		
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel		1 Dokumen		
	962-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	061-Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1 Layanan	1 Layanan	100
	994-Layanan Perkantoran	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100
Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		82.5 Poin		

Tabel 10. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2024

Kegiatan /Sasaran Kegiatan	IKK/KRO/RO	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasiSDH	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan Kawasan hutan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Laporan	1 Laporan	100

Kegiatan / Sasaran Kegiatan	IKK/KRO/RO	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian %
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 SK dan Peta	2 SK dan Peta	100
	Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	1 Dokumen	1 Dokumen	100
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1 Laporan	1 Laporan	100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	80 Poin		
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3 Level		
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen		
	962-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	100
	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82.5 Poin		

B. EFEKTIVITAS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran efektivitas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja Tahun 2024 suatu output dengan persentase capaian kinerja tahun 2023.

Tabel 11. Efektivitas Pengukuran Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Kegiatan /Sasaran Kegiatan	IKK/KRO/RO	Capaian %		Efektifitas
		2023	2024	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	100	100	1
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	100	100	1
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	100	100	1
	Data dan informasi deforestasi	100	100	1
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Geospasial Tematik LHK	100	100	1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan				
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	100	100	1
	Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	100	100	1
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	100	100	1
Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	-	100	-

C. EFISIENSI CAPAIAN KINERJA

Pengukuran efisiensi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan persentase capaian kinerja fisik dengan persentase realisasi anggarannya. Hasil pengukuran tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Efisiensi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	% Capaian Fisik Tahun 2024	% Capaian Keuangan Tahun 2024	Efisiensi %
Tersedia dan termutakhirkan data dan informasi SDH	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	100	99,99	0,01
		Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	1 Dokumen	100	99,99	0.01
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 SK dan Peta	100	100	0
		Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	1 Layanan	100	100	0
	Data dan informasi					

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	% Capaian Fisik Tahun 2024	% Capaian Keuangan Tahun 2024	Efisiensi %
	deforestasi	Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1 Dokumen	100	99,95	0,05
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1 Laporan	100	100	0
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan informasi geospasial tematik LHK	Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Laporan	100	100	0
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel					
	Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	100	96,50	3,50
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	1 Layanan	100	99,57	0,43
Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
Capaian Efisiensi %				100	99,50	0,50

Dari hasil analisa efisiensi penggunaan anggaran dengan membandingkan antara capaian fisik dan capaian realisasi keuangandiperoleh nilai 0,01. Hal ini berarti bahwa capaian fisik lebih besar dibandingkan capaian realisasi keuangan dan menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian output.

D. PROGRES CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2020-2024

Secara umum pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Data Hutan telah sejalan dengan Renstra 2020-2024, hal tersebut tertuang pada tabel berikut:

Tabel 13. Progres Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 5 Tahun*	Realisasi Pertahun (Periode Renstra)					Total Realisasi s.d Th Ybs	% Realisasi Kumulatif Terhadap Target 5 Tahun
			2020	2021	2022	2023	2024		
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan Kawasan hutan	15 Dokumen	3	3	3	3	3	15	100
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	8 Laporan	1	1	2	2	2	8	100
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	10 Data &Peta	2	2	2	2	2	8	100
	Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	5 Dokumen	1	1	1	1	1	5	100
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	5 Laporan	1	1	1	1	1	5	100
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan DitjenPKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	83 Poin	79	80	81	82	80	83	103
	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	3 Level	3	3	3	3	3	3	100
		5 Dokumen	1	1	1	1	1	5	100
Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82,5 Poin	-	-	-	-	82.5	82.5	100

E. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), hampir seluruh kegiatan rinci tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja *sangat baik*. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan telah dilakukan secara efektif karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan **Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan** adalah sebagai berikut:

1. IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan

Tabel 14. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan

Sasaran Kegiatan	IKK	Komponen Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Pada IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan terdapat target 3 dokumen yaitu Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan sebanyak 1 Dokumen dengan output Buku Potensi Sumber daya Hutan dan Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional sebanyak 2 Dokumen dengan output Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Tahun 2023 dan Laporan Pemantauan Penutupan Lahan pada Unit Pengelolaan.

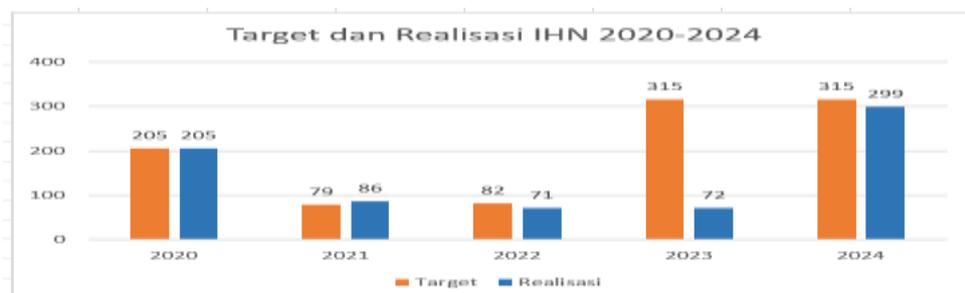
Tabel 15. Progres Pelaksanaan IKK Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan hutan

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TAHUN 2024		REALISASI		
				TGT	SAT	REA	SAT	OUTPUT
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	3	Dokumen	3	Dokumen	1. Buku Potensi Sumber Daya Hutan 2. Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Tahun 2023 3. Laporan Pemantauan Penutupan Lahan pada Unit Pengelolaan

1.1. Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan

Dalam mendukung IKU Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, khususnya dalam hal Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan telah dilakukan penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan yang diperoleh dari hasil kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional.

Target kegiatan IHN sesuai Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Nomor P.4/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 adalah sejumlah 996 klaster. Realisasi sampai dengan tahun 2024 sebanyak 733 klaster atau sekitar 74%.



Gambar 4. Target dan Realisasi IHN Tahun 2020-2024

Permasalahan tidak terpenuhinya target pelaksanaan IHN salah satunya dikarenakan proporsi anggaran yang tersedia tidak sesuai target kegiatan, sehingga terdapat pengurangan jumlah klaster per tahun yang dikerjakan oleh BPKHTL.

Tahun 2024 telah dilakukan analisa data IHN periode 2015-2023 sebanyak 1171 plot untuk mendapatkan potensi sumber daya hutan Indonesia. Data IHN tersebut tersebar di Hutan Lahan Kering, Hutan Rawa dan Hutan Mangrove dengan rincian seperti pada tabel berikut.

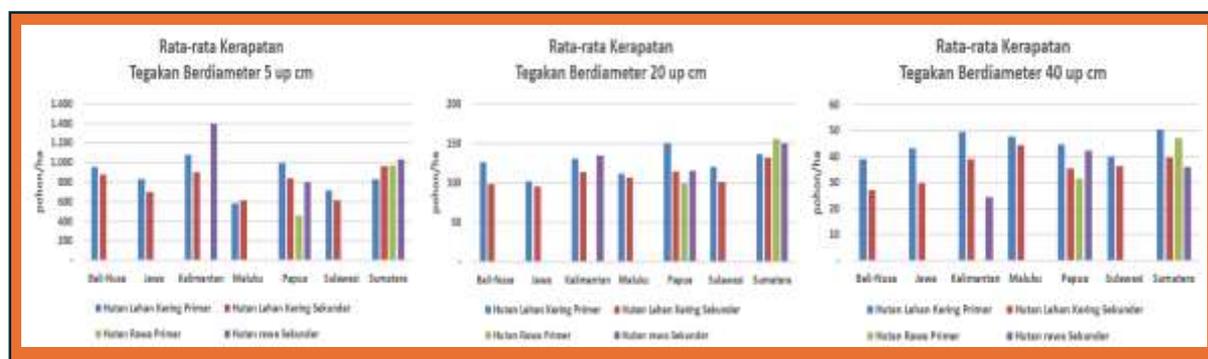
Tabel 16. Jumlah sampel PSP yang dianalisis periode 2015-2023

Tipe lahan	Pulau	Jumlah PSP
Lahan kering	Bali-Nusa	94
	Jawa	71
	Kalimantan	130
	Maluku	57
	Papua	101
	Sulawesi	212
	Sumatera	268
Rawa	Bali-Nusa	-
	Jawa	-
	Kalimantan	12
	Maluku	-
	Papua	10
	Sulawesi	-
	Sumatera	20
Mangrove	Bali-Nusa	8
	Jawa	5
	Kalimantan	77
	Maluku	12
	Papua	33
	Sulawesi	17
	Sumatera	44
Jumlah		1171

Analisis data IHN dilakukan untuk mendapatkan potensi sumberdaya hutan pada kawasan hutan di tujuh pulau besar di Indonesia yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Informasi potensi sumberdaya hutan mencakup kerapatan tegakan, bidang dasar tegakan, volume tegakan, biomassa tegakan, dan cadangan karbon tegakan dikelompokkan dalam 3 tipe lahan yaitu hutan lahan kering, hutan rawa dan hutan mangrove. Potensi sumber daya hutan tersebut tersaji dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 17. Kerapatan Tegakan Pada Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa Berdasarkan Kelas Diameter

Pulau Besar	Tipe dan Kondisi Hutan	Jumlah Sampel	Kerapatan Tegakan (pohon/ha)		
			DBH 5-up	DBH 20-up	DBH 40-up
Bali-Nusa Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	59	951	126	39
	Hutan Lahan Kering Sekunder	35	875	98	27
Jawa	Hutan Lahan Kering Primer	3	835	102	43
	Hutan Lahan Kering Sekunder	68	700	95	30
Kalimantan	Hutan Lahan Kering Primer	18	1.078	131	49
	Hutan Lahan Kering Sekunder	112	898	113	39
	Hutan Rawa Sekunder	12	1.400	135	24
Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	11	584	111	48
	Hutan Lahan Kering Sekunder	46	613	107	45
Papua	Hutan Lahan Kering Primer	51	994	150	45
	Hutan Lahan Kering Sekunder	50	838	115	35
	Hutan Rawa Primer	5	457	99	32
	Hutan Rawa Sekunder	5	801	115	42
Sulawesi	Hutan Lahan Kering Primer	108	718	120	40
	Hutan Lahan Kering Sekunder	104	616	101	36
Sumatera	Hutan Lahan Kering Primer	112	832	136	50
	Hutan Lahan Kering Sekunder	151	960	131	40
	Hutan Rawa Primer	2	na	na	na
	Hutan Rawa Sekunder	18	1.030	149	36
Indonesia	Hutan Lahan Kering Primer	362	845	130	44
	Hutan Lahan Kering Sekunder	566	809	112	37
	Hutan Rawa Primer	7	604	115	36
	Hutan Rawa Sekunder	35	1.124	139	33



Gambar 5. Kerapatan tegakan di hutan lahan kering dan hutan rawa

Tabel 18. Luas Bidang Dasar Tegakan pada Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa Berdasarkan Kelas Diameter

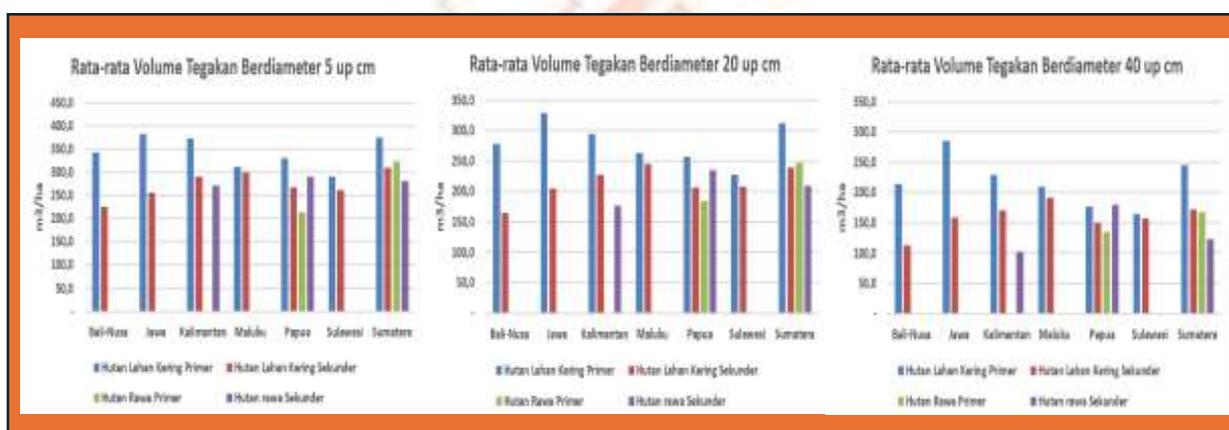
Pulau Besar	Tipe dan Kondisi Hutan	Jumlah Sampel	Luas Bidang Dasar (m ² /ha)		
			DBH 5-up	DBH 20-up	DBH 40-up
Bali-Nusa Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	59	26,5	18,6	13,0
	Hutan Lahan Kering Sekunder	35	19,2	11,9	7,3
Jawa	Hutan Lahan Kering Primer	3	27,3	20,5	16,8
	Hutan Lahan Kering Sekunder	68	19,8	13,8	9,7
Kalimantan	Hutan Lahan Kering Primer	18	29,5	20,1	14,5
	Hutan Lahan Kering Sekunder	112	23,6	15,9	11,0
	Hutan Rawa Sekunder	12	24,7	13,2	7,0
Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	11	23,8	18,1	13,6
	Hutan Lahan Kering Sekunder	46	23,3	17,0	12,3
Papua	Hutan Lahan Kering Primer	51	27,3	18,7	11,6
	Hutan Lahan Kering Sekunder	50	22,1	14,7	9,7
	Hutan Rawa Primer	5	16,5	12,9	8,6
	Hutan Rawa Sekunder	5	23,0	16,3	11,6
Sulawesi	Hutan Lahan Kering Primer	108	23,5	16,1	10,6
	Hutan Lahan Kering Sekunder	104	20,7	14,5	10,1
Sumatera	Hutan Lahan Kering Primer	112	28,6	21,1	15,3
	Hutan Lahan Kering Sekunder	151	25,2	16,9	11,1
	Hutan Rawa Primer	2	na	na	Na
	Hutan Rawa Sekunder	18	24,6	15,9	8,4
Indonesia	Hutan Lahan Kering Primer	362	26,4	18,7	12,9
	Hutan Lahan Kering Sekunder	566	22,8	15,5	10,5
	Hutan Rawa Primer	7	19,6	14,5	9,4
	Hutan Rawa Sekunder	35	24,7	15,3	8,4



Gambar 6. Bidang dasar tegakan di hutan lahan kering dan hutan rawa

Tabel 19. Volume Tegakan Hutan pada Hutan Lahan Kering dan Hutan Rawa Berdasarkan Kelas Diameter

Pulau Besar	Tipe dan Kondisi Hutan	Jumlah Sampel	Volume Tegakan (m ³ /ha)		
			DBH 5-up	DBH 20-up	DBH 40-up
Bali-Nusa Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	59	342,8	277,5	213,7
	Hutan Lahan Kering Sekunder	35	225,9	165,0	112,7
Jawa	Hutan Lahan Kering Primer	3	383,2	328,0	286,1
	Hutan Lahan Kering Sekunder	68	255,0	205,6	158,4
Kalimantan	Hutan Lahan Kering Primer	18	372,4	293,7	229,2
	Hutan Lahan Kering Sekunder	112	290,4	226,9	170,7
	Hutan Rawa Sekunder	12	271,7	177,1	101,8
Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	11	311,2	263,0	210,2
	Hutan Lahan Kering Sekunder	46	300,1	244,9	191,0
Papua	Hutan Lahan Kering Primer	51	330,2	257,9	177,3
	Hutan Lahan Kering Sekunder	50	268,3	206,3	149,5
	Hutan Rawa Primer	5	214,3	184,3	135,1
	Hutan Rawa Sekunder	5	290,6	235,0	180,1
Sulawesi	Hutan Lahan Kering Primer	108	290,9	227,6	164,2
	Hutan Lahan Kering Sekunder	104	261,0	207,7	157,8
Sumatera	Hutan Lahan Kering Primer	112	375,5	311,8	245,0
	Hutan Lahan Kering Sekunder	151	308,9	239,6	172,3
	Hutan Rawa Primer	2	na	na	na
	Hutan Rawa Sekunder	18	281,6	209,2	122,8
Indonesia	Hutan Lahan Kering Primer	362	336,5	271,2	204,9
	Hutan Lahan Kering Sekunder	566	280,5	220,0	163,5
	Hutan Rawa Primer	7	245,1	202,2	144,5
	Hutan Rawa Sekunder	35	279,5	201,8	123,8

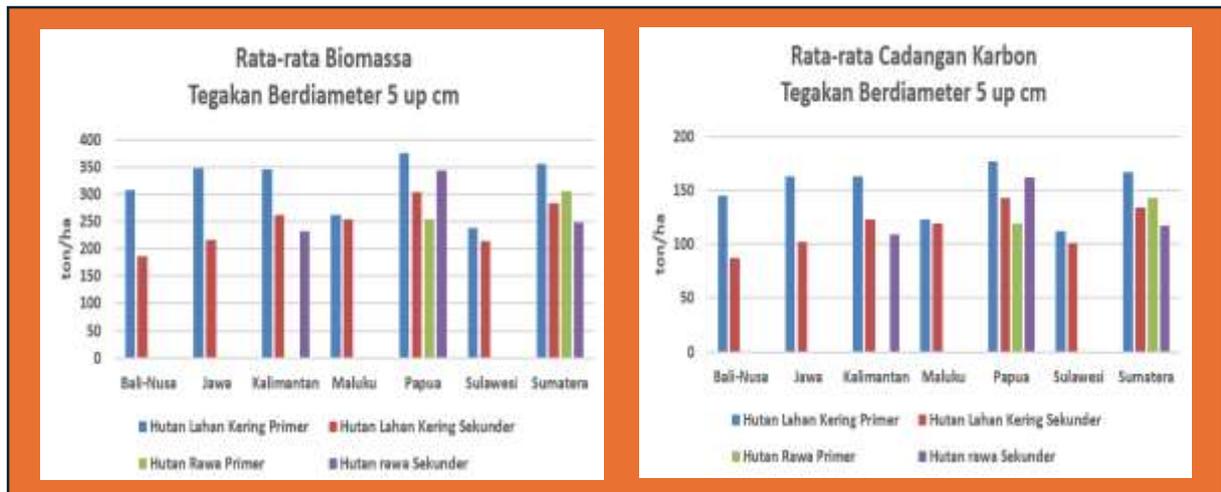


Gambar 7. Volume tegakan di hutan lahan kering dan hutan rawa

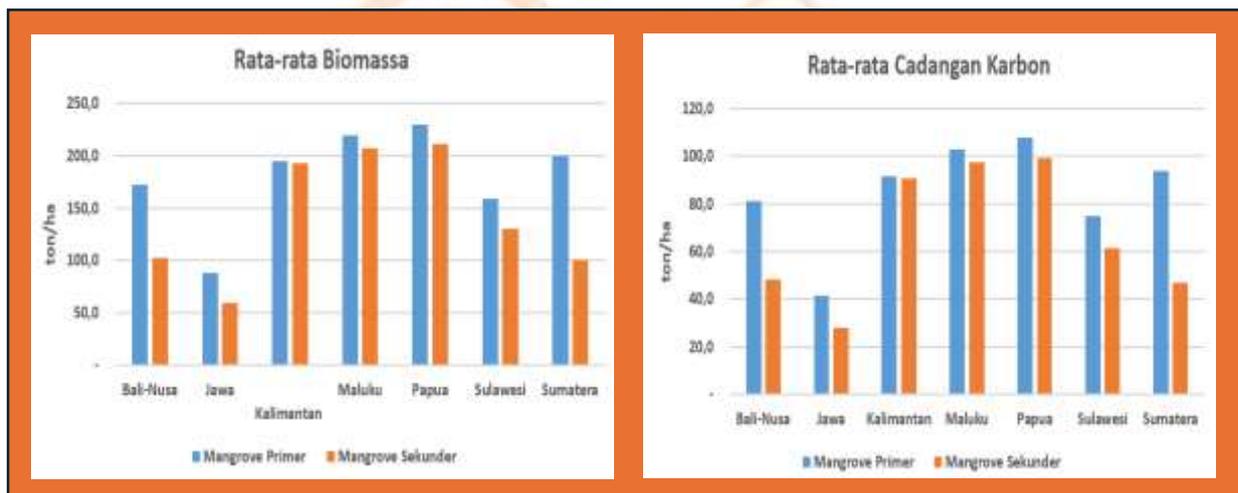
Tabel 20. Biomassa dan Cadangan Karbon Tegakan Berdiameter 5-up cm

Pulau Besar	Tipe dan Kondisi Hutan	Jumlah Sampel	Biomassa (ton/ha)	Cadangan karbon (ton/ha)
Bali-Nusa Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	59	308,4	145,0
	Hutan Lahan Kering Sekunder	35	185,5	87,2
	Hutan Mangrove Primer	4	172,5	81,1
	Hutan Mangrove sekunder	4	102,6	48,2
Jawa	Hutan Lahan Kering Primer	3	347,8	163,5
	Hutan Lahan Kering Sekunder	68	217,3	102,1
	Hutan Mangrove Primer	2	NA	NA
	Hutan Mangrove sekunder	3	59,7	28,1
Kalimantan	Hutan Lahan Kering Primer	18	346,7	163,0
	Hutan Lahan Kering Sekunder	112	263,0	123,6
	Hutan Rawa Sekunder	12	232,1	109,1
	Hutan Mangrove Primer	4	194,8	91,6
	Hutan Mangrove sekunder	73	192,8	90,6
Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	11	261,6	123,0
	Hutan Lahan Kering Sekunder	46	253,7	119,2
	Hutan Mangrove Primer	9	219,1	103,0
	Hutan Mangrove sekunder	3	207,4	97,5
Papua	Hutan Lahan Kering Primer	51	375,9	176,7
	Hutan Lahan Kering Sekunder	50	304,2	143,0
	Hutan Rawa Primer	5	253,6	119,2
	Hutan Rawa Sekunder	5	344,4	161,9
	Hutan Mangrove Primer	18	229,4	107,8
	Hutan Mangrove sekunder	15	210,9	99,1
Sulawesi	Hutan Lahan Kering Primer	108	238,9	112,3
	Hutan Lahan Kering Sekunder	104	214,7	100,9
	Hutan Mangrove Primer	5	158,9	74,7
	Hutan Mangrove sekunder	12	130,2	61,2
Sumatera	Hutan Lahan Kering Primer	112	355,6	167,2
	Hutan Lahan Kering Sekunder	151	284,6	133,8
	Hutan Rawa Primer	2	NA	NA
	Hutan Rawa Sekunder	18	249,2	117,1
	Hutan Mangrove Primer	18	199,6	93,8
	Hutan Mangrove sekunder	26	100,0	47,0
Indonesia	Hutan Lahan Kering Primer	362	312,6	146,9

Pulau Besar	Tipe dan Kondisi Hutan	Jumlah Sampel	Biomassa (ton/ha)	Cadangan karbon (ton/ha)
	Hutan Lahan Kering Sekunder	566	252,5	118,7
	Hutan Rawa Primer	7	268,3	126,1
	Hutan Rawa Sekunder	35	256,9	120,8
	Hutan Mangrove Primer	60	202,2	95,0
	Hutan Mangrove sekunder	136	166,3	78,2



Gambar 8. Biomassa dan cadangan karbon tegakan berdiameter 5-up cm di hutan lahan kering dan hutan rawa



Gambar 9. Biomassa dan cadangan karbon tegakan berdiameter 5-up cm di hutan mangrove

Redesain Inventarisasi Hutan Nasional

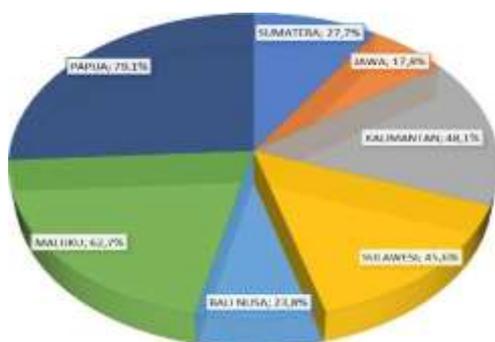
Sebagai upaya efisiensi anggaran dan efektifitas kegiatan dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan dan teknologi serta pertimbangan kebutuhan data potensi sumber daya hutan; telah dilakukan upaya Redesain IHN melalui kerjasama KLHK - FAO dalam *Project Strengthening Indonesian Forest and Land Monitoring For Climate Actions* yang mulai dilaksanakan sejak Tahun 2019. Pada tahun 2024 telah dihasilkan desain IHN baru yaitu IHN 2.0 yang akan diimplementasikan mulai tahun 2025. Tahun 2024 dimanfaatkan sebagai masa transisi yang akan digunakan untuk sosialisasi, peningkatan kapasitas (pelatihan pelaksana IHN) serta pengadaan sarana prasarana berupa tablet dan alat ukur tinggi pohon (vertex dan transponder).

1.2. Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional

Kegiatan ini menghasilkan dua output, yaitu:

a. Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia

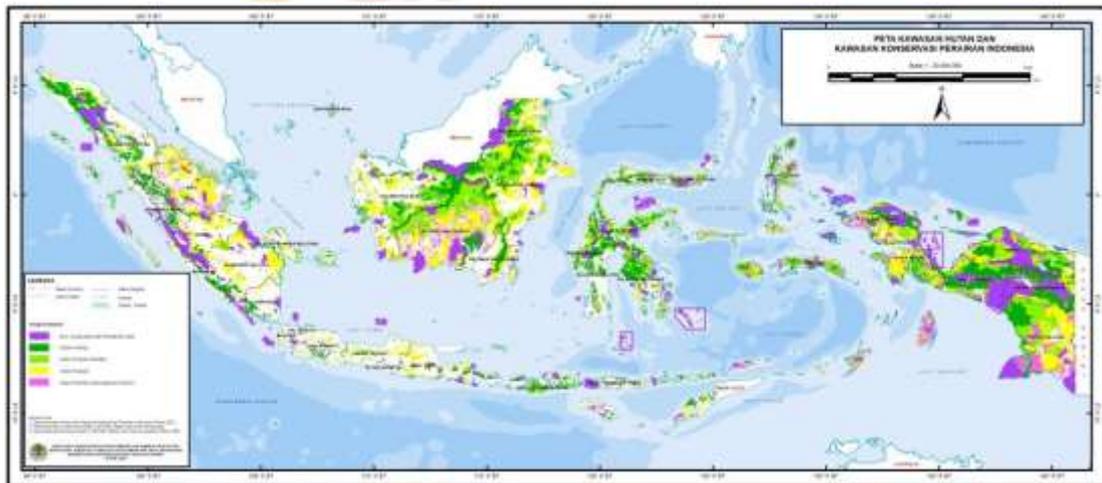
Rekalkulasi penutupan lahan dilakukan terhadap seluruh daratan Indonesia seluas 187,9 juta ha, yaitu pada 7 (tujuh) kelompok pulau/kepulauan besar atau 38 provinsi, yang terdiri atas kawasan hutan daratan seluas 118,2 juta ha atau 62,9% dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 69,7 juta ha atau 37,1% (tubuh air (danau, sungai besar, kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan). Hasil rekalkulasi penutupan lahan disajikan dalam bentuk Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023 dilengkapi dengan analisis terhadap Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Indonesia.



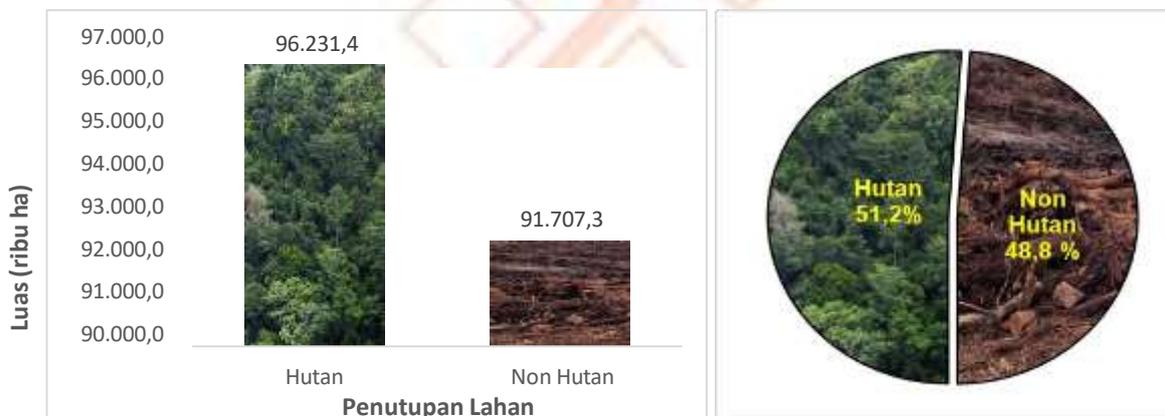
Gambar 10. Diagram Persentase Penutupan Lahan Berhutan di dalam Kawasan Hutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar



Gambar 11. Peta Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023



Gambar 12. Peta Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia



Gambar 13. Diagram Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2023, dalam pengelompokan kelas berhutan dan tidak berhutan

Hasil rekalkulasi penutupan lahan:

1. Luas seluruh daratan Indonesia sebesar 187,9 juta ha terdiri dari 96,2 juta ha (51,2%) lahan berhutan dan 91,7 juta ha (48,8%) merupakan lahan tidak berhutan.
2. Luas kawasan hutan daratan sebesar 118,2 juta ha terdiri dari 88,4 juta ha (74,8%) lahan berhutan dan 29,8 juta ha (25,2%) merupakan lahan tidak berhutan.
3. Luas Areal Penggunaan Lain sebesar 69,7 juta ha terdiri dari 7,9 juta ha (11,3%) lahan berhutan dan 61,9 juta ha (88,7%) merupakan lahan tidak berhutan.
4. Rekalkulasi ini difokuskan pada luas penutupan lahan “berhutan” pada berbagai fungsi kawasan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hutan Konservasi seluas 17,6 juta ha (80,5% dari luas total Hutan Konservasi 21,8 juta ha);
 - b. Hutan Lindung seluas 24,0 juta ha (82,1% dari luas total Hutan Lindung 29,2 juta ha);
 - c. Hutan Produksi Terbatas seluas 21,9 juta ha (81,6% dari luas total Hutan Produksi Terbatas 26,8 juta ha);
 - d. Hutan Produksi Tetap seluas 19,2 juta ha (65,7% dari luas total Hutan Produksi Tetap 29,2 juta ha); dan,
 - e. Hutan Produksi yang dapat di-Konversi seluas 5,7 juta ha (51,4% dari luas total Hutan Produksi yang dapat di-Konversi 11,1 juta ha).
- b. Pemantauan Penutupan Lahan pada Unit Pengelolaan

Pemantauan penutupan lahan pada unit pengelolaan dilaksanakan melalui kegiatan penelaahan penutupan lahan pada areal IUPHHK-HA/HT dan atau Perizinan Areal Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui pemeriksaan citra resolusi sedang. Proses ini dilaksanakan dengan tahapan :

- i. Pemeriksaan legalitas dokumen dari Surat Keputusan, Penetapan Areal Kerja PBPH;
- ii. Pemeriksaan baseline citra yang dipergunakan untuk memperoleh data penutupan lahan yaitu jenis citra satelit, resolusi, scene id

sesuai dengan lokasi dengan penetapan areal kerja, tanggal, kontras gambar, tutupan awan pada citra terpilih, batas, kondisi deliniasi, kualitas citra dan kartografi;

- iii. Analisis data dengan data keputusan perkembangan pengukuhan kawasan hutan;
- iv. Pemeriksaan kesesuaian tampilan peta hasil sesuai dengan petunjuk teknis penafsiran citra penginderaan jauh untuk menghasilkan data penutupan lahan skala 1:50.000 pada areal unit pengelolaan;

Selama tahun 2024, telah dilakukan analisis terhadap 60 permohonan telaah penutupan lahan pada areal PBPH yang terdiri atas 17 permohonan telaah PBPH-HA, 37 permohonan telaah PBPH-HP, dan 6 permohonan telaah PBPH-HTI. Luasan yang ditelaah meliputi total 3.810.314,81 ha, yang terdiri atas 1.268.317,21 ha (PBPH-HA), 1.899.688,23 ha (PBPH-HP) dan 642.309,37 ha (PBPH-HTI). Seluruh PBPH yang ditelaah tersebut tersebar di 14 Provinsi.

Berkas proses dan hasil penelaahan penutupan lahan pada unit pengelolaan dikelola secara terpusat lingkup Kementerian LHK. Proses pemindahan berlangsung mulai dari pemindahan arsip dari Direktorat IPSDH (selaku Unit Pengolah II – UP II), ke Sekretariat Direktorat Jenderal PKTL (selaku Unit Pengolah I – UP I), dan akhirnya ke Biro Umum, Sekretariat Jenderal KLHK (selaku Unit Pusat Kearsipan KLHK - UPK). Pemindahan dilakukan terhadap berkas tahun 2023 yang telah dilakukan pemindaian dan pengarsipan. Hasil rekonstruksi arsip yang dilakukan bersama dengan UP-I dan UPK, berhasil memindahkan arsip sebanyak 60 sampul pada arsip tahun 2024.

4 IKK Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan

Tabel 21. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan

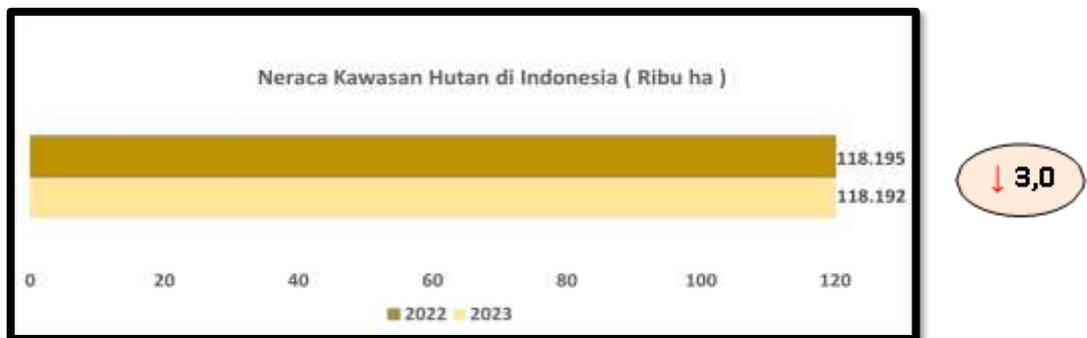
Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2 Laporan	2 Laporan	100

Tabel 22. Progres Pelaksanaan IKK Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TAHUN 2024		REALISASI		KETERANGAN PROGRES
				TGT	SAT	REA	SAT	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2	Laporan	2	Laporan	1. Buku NSDH Tahun 2023 2. Laporan Analisis Pemantauan SDH Tahun 2024

a. Neraca Sumber Daya Hutan Tahun 2023

Neraca Sumber Daya Hutan (untuk selanjutnya disebut sebagai NSDH adalah instrumen yang dipergunakan untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan perubahan yang terjadi pada sumber daya hutan, baik dengan besaran fisik (luasan dan volume), maupun dengan besaran moneter. NSDH disajikan setiap tahun untuk memberikan gambaran perubahan tahunan yang terjadi pada sumber daya hutan. Pada Tahun 2024 dihasilkan NSDH 2023. NSDH 2023 disajikan dengan menampilkan saldo awal (besaran tahun 2022) dan saldo akhir (besaran tahun 2023). Data yang disajikan berupa Neraca Sumber Daya Lahan yang didalamnya terkandung Neraca Kawasan Hutan, Neraca Penutupan Hutan, dan Neraca Sumber Daya Kayu yang didalamnya terkandung informasi berkaitan dengan Neraca Potensi Kayu dan Neraca Potensi Moneter Kayu. Data tersebut kemudian disajikan dalam setiap kelompok pulau dan provinsi. Dimulai dari NSDH 2022 prosedur perhitungan luasan diselaraskan dengan perhitungan luasan dalam Rekalkulasi Penutupan Lahan tahun 2021, yang didasarkan murni dari perhitungan berdasarkan perhitungan pada basis data geospasial kawasan hutan dan penutupan lahan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka luas kawasan hutan Indonesia (yang berupa daratan) pada tahun 2023 adalah 118,2 juta ha.



Gambar 14. Neraca Kawasan Hutan di Indonesia

Luas tersebut terbagi ke dalam masing-masing fungsinya, diantaranya Hutan Konservasi (HK) dengan luasan 21,8 juta ha, Hutan Lindung (HL) dengan luasan 29,3 juta ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luasan 26,8 juta ha, Hutan Produksi (HP) dengan luasan 29,2 juta ha dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) dengan luasan 11,1 juta ha. Secara Nasional, luas kawasan hutan mengalami defisit sebesar 1.484,4 ha dibandingkan dengan saldo awal luas awal sebesar 118,2 juta ha. Perubahan luas ini terjadi pada HK dengan kenaikan sebesar 61,6 ribu ha, HL mengalami kenaikan sebesar 47,8 ribu ha, HPT mengalami kenaikan sebesar 27,1 ribu ha, HP mengalami penurunan sebesar 10,1 ribu ha, dan HPK mengalami penurunan sebesar 127,9 ribu ha. Secara nasional, pada Tahun 2023 luas daratan yang berpenutupan hutan sebesar 96 juta ha atau sebesar 51,2 % dari total daratan. Perubahan penutupan hutan secara nasional mengalami defisit sebesar 121,1 ribu ha atau sebesar 0,1 % dari saldo awal. Pada saldo awal (kondisi tahun 2022), seluruh wilayah kawasan hutan mempunyai penutupan hutan sebesar 88,43 juta ha. Sementara pada saldo akhir (kondisi tahun 2023), penutupan hutan sebesar 88,36 juta ha. Berdasarkan data tersebut maka telah terjadi defisit penurunan penutupan hutan sebesar 72,2 ribu ha atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan saldo awal. Sumber daya kayu disajikan dalam Neraca Potensi Kayu dalam satuan volume kayu (m³) dan Neraca Potensi Moneter Kayu dalam satuan mata uang rupiah (Rp). Saldo awal (kondisi tahun 2022) neraca potensi kayu sebesar 12.845,2 juta m³ dan saldo akhir (kondisi tahun 2023) sebesar 12.836,6 juta m³, sehingga potensi volume kayu mengalami defisit sekitar 8,6 juta m³. Sementara untuk Neraca Potensi Moneter Kayu, saldo awal sebesar Rp. 5.123,3 Triliun dan saldo akhir sebesar Rp. 5.121,3 Triliun, sehingga nilai potensi kayu mengalami defisit sekitar Rp. 2 Triliun.

Proporsi Luas Daratan Tahun 2023



Proporsi Penutupan Lahan Tahun 2023



Besar Potensi dan Nilai Potensi Kayu Kawasan Hutan Menurut Pulau Tahun 2023



Potensi Kayu = 12.836,6 juta m3

Nilai Potensi Moneter Kayu = Rp 5.121,3 Triliun



b. Hasil Analisis Pemantauan SDH Tahun 2024

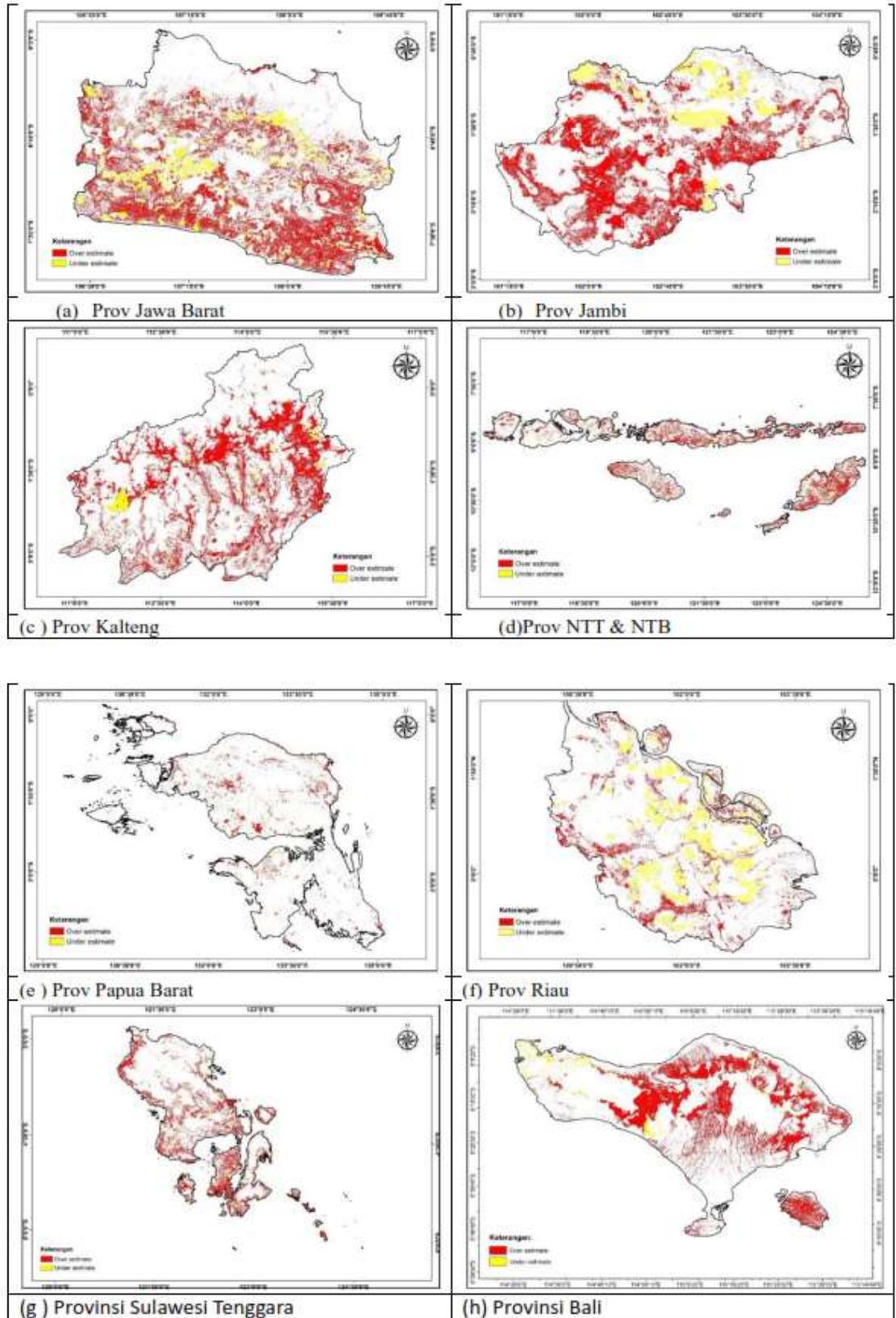
Pada tahun 2024, dilakukan analisis terhadap Peta Hutan Global dengan tujuan (1) Mengukur tingkat (persentase) perbedaan antara peta GFM dengan peta KLHK berdasarkan kajian teknisa di beberapa lokasi contoh (2) Mengukur trend, trajektori sebaran spasial perbedaan peta GFM dan peta KLHK. performance dari peta tutupan hutan dan lahan yang dibangun oleh KLHK dan (3) Mengidentifikasi Kelebihan dan Keterbatasan peta GFM dan Tuplah KLHK.

Peta Hutan Global adalah peta penutupan lahan yang dibuat secara global dengan menggabungkan dataset terkait tutupan tajuk pohon (tree cover) tinggi pohon, tutupan lahan dan penggunaan lahan. Data yang digunakan merupakan kombinasi dari dataset ESA world cover 2021 dan 2020, WRI Tropical Tree Cover 2020, UMD tutupan lahan dan penggunaan lahan 2019, Global mangrove watch 2020, dan JRC Tropical moist forest 2020. Peta ini memiliki resolusi spasial 10m dan memiliki kekurangan klasifikasi hutan (khususnya) di negara Indonesia akan cenderung overestimate di wilayah perkebunan sawit skala kecil, kebun sawit campuran (polikultur), atau perkebunan sawit dengan penutupan kanopi rendah. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai Omission Error. Peta ini dibuat dengan tujuan untuk mendukung penerapan Peraturan UE terkait rantai pasok bebas deforestasi.

Dari kajian ini didapatkan bahwa peta Peta Hutan Global menghasilkan peta hutan berlebih (over- estimated forest), jauh lebih besar dibandingkan dengan luas tutupan hutan pada peta Indonesia (SIMONTANA). Hal ini disebabkan karena perbedaan definisi hutan dan resolusi spasial sumber data yang digunakan juga perbedaan metode klasifikasi. Estimasi hutan berlebih pada tutupan lahan seperti pertanian lahan kering campur semak (PLKC), semak belukar, savana, dan padang rumput.

Peta hutan global diperoleh dari citra indeks vegetasi yang diturunkan dari Citra Sentinel dengan resolusi spasial 10m dengan metode otomatis. Klasifikasinya dilakukan menggunakan algoritma “random forest” machine learning (Belgiu & Dragut 2016). Peta tutupan hutan KLHK diterapkan menggunakan metode “itterative refinement visual interpretation”. Hasil penafsiran hutan Indonesia berdasarkan peta tutupan hutan tahun-tahun sebelumnya yang selalu diperbaiki berdasarkan hasil-hasil ground-truth dan ground-check.

Beberapa contoh sebaran spasial areal hutan yang mengalami estimasi berlebih (over-estimated) dan yang mengalami estimasi kurang (under-estimated) di lokasi-lokasi kajian.



5 IKK Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Tabel 23. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2 SK dan Peta	2 SK dan Peta	100
		Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut			

Pada IKK Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut 2024 ini terdapat target 2 SK dan Peta pada Unit Kegiatan Pengolahan Data dan Informasi areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Selain itu terdapat kegiatan Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Tabel 24. Progres Pelaksanaan IKK Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TAHUN 2024			REALISASI	
				TGT	SAT	REA	SAT	KETERANGAN PROGRES
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	SK dan Peta	2	SK dan Peta	ND.24/IPSDH/PSDH/PLA.2.8/B/6/2024 tanggal 10 Juni 2024 Konsep Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) Tahun 2024 Periode I ND.290/IPSDH/PSDH/PLA.1/13/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 Konsep Penetapan Peta Indikatif Penghentian

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TAHUN 2024		REALISASI		
				TGT	SAT	REA	SAT	KETERANGAN PROGRES
								Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) Tahun 2024

a. **Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut**

Menindaklanjuti terbitnya Keputusan Menteri LHK Nomor 399 Tahun 2024 tentang Standar Penyebarluasan IGT Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perhitungan luas PIPPIB Tahun 2024 yang semula mempergunakan proyeksi PDC Mercator kemudian diseragamkan dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan proyeksi Cylindrical Equal Area (World). Perubahan proyeksi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan perhitungan luas sebagaimana kami sajikan dalam Tabel 1. PIPPIB Tahun 2024 disusun berdasarkan PIPPIB tahun 2023 periode II.

Tabel 25 . Rekapitulasi Perubahan Luasan PIPPIB

KATEGORI PIPPIB	LUAS AREAL PIPPIB (HA)	
	PIPIB TAHUN 2023/II*	PIPIB TAHUN 2023/II**
Kategori PIPPIB Kawasan	51.543.022	51.375.223,20
Kategori PIPPIB Gambut	5.227.615	5.217.170,66
Kategori PIPPIB Primer	9.842.255	9.805.242,63
JUMLAH	66.612.892	66.397.636,49

*) Perhitungan luas menggunakan proyeksi *PDC Mercator*

**) Perhitungan luas menggunakan proyeksi *Cylindrical Equal Area (World)*

Tabel 26. Rincian Perubahan Pemutakhiran PIPPIB

NO.	KETERANGAN PERUBAHAN	LUAS (HA)
PENGURANGAN		-329.485,82
1.	Konfirmasi Perizinan dan/atau Alas Hak yang terbit sebelum Tahun 2011	-6.943,57
	Masukan dari masyarakat/badan usaha/pemerintah tentang perizinan dan/atau penguasaan lahan yang terdiri dari Perizinan, Persetujuan, HGU, SHM, SKGR, SKT, legalisasi asset, dan kepemilikan lahan lainnya sebelum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan di APL	
2.	Pemutakhiran Data Perizinan	-5.342,02
	Pemutakhiran IGT Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	
3.	Pemutakhiran IGT Bidang Tanah	-212.844,02
	Data bidang tanah di APL dari Kementerian ATR/BPN	
4.	Perubahan Tata Ruang (Kehutanan)	-19.678,03
	Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	
5.	Laporan Survei Hutan Alam Primer	-81.431,29
	Hasil pelaksanaan survei hutan alam primer	
6.	Laporan Survei Lahan Gambut	-3.246,89
	Hasil pelaksanaan survei lahan gambut	
PENAMBAHAN		+23.092,26
1.	Pemutakhiran Data Perizinan	+5.673,10
	Pemutakhiran IGT Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	
2.	Perubahan Tata Ruang (Kehutanan)	+17.419,16
	Pemutakhiran IGT Kawasan Hutan	
JUMLAH		-306.393,56

Untuk PIPPIB Tahun 2024, luas areal PIPPIB secara umum berkurang seluas $\pm 306.393,56$ Ha sehingga luas total areal PIPPIB Tahun 2024 menjadi seluas $\pm 66.091.242,93$ Ha. Data perkembangan tersebut merupakan Hasil Pengolahan Data PIPPIB per Juni 2024 yang sebelumnya akan digunakan untuk penerbitan PIPPIB Tahun 2024 Periode I, namun masih belum dapat diproses lebih lanjut.

Perkembangan Pengolahan Data PIPPIB hingga bulan Desember 2024 terdapat penambahan pengurangan luas PIPPIB yang cukup signifikan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 27. Rincian Pengurangan Luas PIPPIB hingga Desember 2024

No.	Mekanisme Survei	Luas (ha)
1	Hak Atas Tanah	10.986,05
2	Survei Lahan Gambut	111,74
3	Survei Hutan Alam Primer	15.134,01
Total Pengurangan (ha)		26.231,80

Hingga bulan Desember 2024 luas pengurangan areal PIPPIB adalah seluas $\pm 26.231,80$ Ha.

Konsep Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) Tahun 2024 Periode II disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan kepada Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor ND.290/IPSDH/PSDH/PLA.1.1/B/12/2024 tanggal 2 Desember 2024.

b. Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Kegiatan Pelayanan Permohonan Revisi PIPPIB ini adalah untuk memproses permohonan revisi areal indikatif penghentian pemberian perizinan berusaha, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau perubahan peruntukan kawasan hutan baru pada hutan alam primer dan lahan gambut yang datanya digunakan untuk pemutakhiran data PIPPIB setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Proses Perkembangan PIPPIB pada tahun 2024 terdiri dari pelayanan Permohonan Revisi PIPPIB yang pada tahun 2024 ini terlayani sebanyak 1.303 surat permohonan dan distribusi surat sebanyak 1.558 surat. Adapun rincian permohonan revisi PIPPIB pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Jumlah Pelayanan PIPPIB Tahun 2024

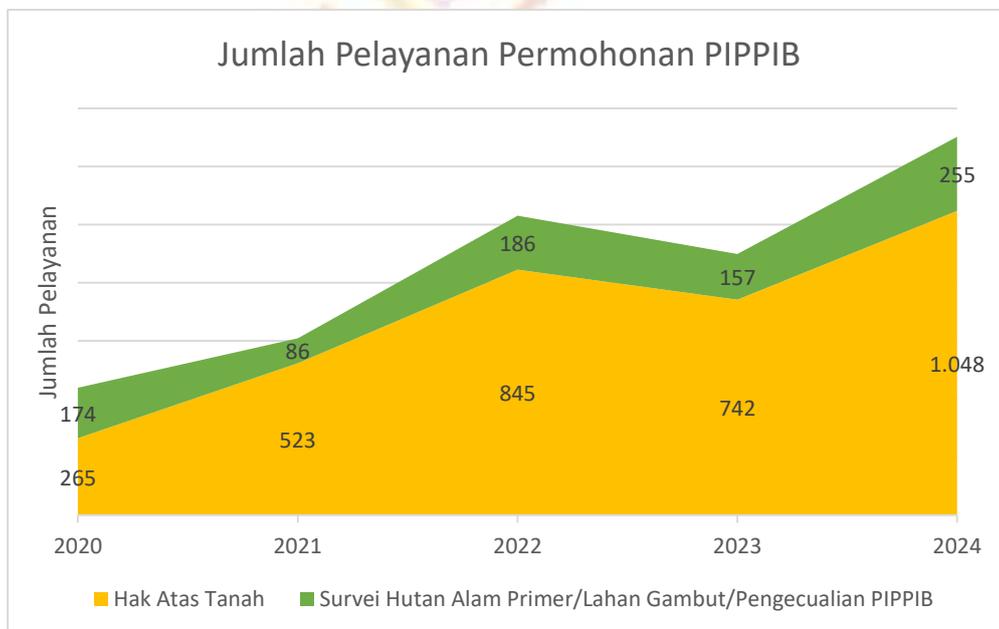
No.	Kategori Jenis Permohonan	Jumlah
1	Hak Atas Tanah	1.048
2	Survei Hutan Alam Primer/Lahan Gambut/Pengecualian PIPPIB	255
Jumlah		1.303

Tabel 29. Jumlah Pelayanan PIPPIB berdasarkan Data Pemohon Tahun 2024

No.	Kategori Pemohon	Jumlah
1	Perorangan	919
2	Instansi Pemerintah	202
2	Swasta	182
Jumlah		1303

Tabel 30. Jumlah Pelayanan Permohonan Revisi PIPPIB Berdasarkan Jenis Permohonan 5 Tahun Terakhir

No.	Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hak Atas Tanah	265	523	845	742	1.048
2	Survei Hutan Alam Primer/Lahan Gambut/Pengecualian PIPPIB	174	86	186	157	255
Jumlah		439	609	1.031	899	1.303



Gambar 16. Grafik pelayanan Permohonan PIPPIB

3. IKK Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK

Tabel 31. Realisasi Pelaksanaan IKK Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Layanan	1 Layanan	100
Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK					

Tabel 32. Progres Pelaksanaan IKK Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TAHUN 2024		REALISASI		KETERANGAN PROGRES
				TGT	SAT	REA	SAT	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Layanan informasi geospasial tematik LHK	1	layanan	1	layanan	

KLHK memiliki lebih dari 100 IGT yang diproduksi oleh 35 Produsen Data Geospasial, dimana 103 IGT sudah tersedia di basisdata Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK. Hal tersebut menuntut inovasi dan optimalisasi kegiatan pengumpulan, penjaminan kualitas, pengelolaan, serta penyebarluasan IGT yang bersumber dari Produsen DG.

Direktorat IPSDH memiliki peran yang strategis dalam mendorong modernisasi birokrasi dari aspek optimalisasi penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) sebagai modalitas pembangunan LHK yang efektif dan efisien.

Direktorat IPSDH (melalui Sub Direktorat JIG), sesuai dengan Permenlhk Nomor 24 Tahun 2021 juga ditetapkan sebagai Walidata Geospasial yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan, penjaminan kualitas, pengelolaan serta penyebarluasan IGT yang bersumber dari Produsen DG. Walidata Geospasial juga bertugas dalam melakukan pengelolaan metadata IGT, membangun dan memelihara basis data geospasial Kementerian, melakukan koordinasi dengan Produsen DG dan UPT dalam pengumpulan,

penyimpanan, pengamanan penjaminan kualitas dan penyebarluasan IGT. Selain itu, juga melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkannya kepada Menteri.

Sampai dengan Agustus 2024, jumlah IGT lingkup KLHK yang tersedia di dalam basis data geospasial KLHK dan dikelola oleh Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial KLHK adalah sebanyak 103 IGT. IGT yang tersedia saat ini belum memenuhi sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran Permen LHK Nomor 24 tahun 2021 dan lampiran SK Menteri LHK Nomor 400 tahun 2024, dimana masih terdapat beberapa IGT yang belum tersedia (dalam proses penyusunan oleh Produsen DG).

Sesuai rekapitulasi hasil pelayanan data hingga Desember 2024, Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial KLHK telah memberikan pelayanan melalui surat sebanyak 256 permohonan. Data yang paling banyak diminta adalah IGT Kawasan Hutan dan IGT Penutupan Lahan. Sedangkan pemohon paling banyak adalah dari Pemerintah Daerah, baik provinsi dan kabupaten maupun kota yang membutuhkan data sebagian besar adalah untuk penyusunan/revisi Rencana Tata ruang dan Wilayah. Selain itu juga banyak pemohon data dari kementerian/lembaga lain yang diperuntukkan untuk mendukung tugas fungsi dan pengambilan keputusan serta perguruan tinggi untuk keperluan penelitian.

Walidata Geospasial memiliki kewenangan pengaturan terhadap akses basis data geospasial (SIGAP KLHK) yang dilakukan oleh Produsen DG, UPT KLHK dan pengguna lainnya (K/L/Pemda).



Rekapitulasi Permohonan IGT LHK kepada Walidata Geospasial Tahun 2024 sebanyak:

256 Permohonan

Kebijakan Satu Peta yang sampai dengan saat ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 dilaksanakan dalam upaya mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita diperlukan guna menjadi acuan satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan bagian dari Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) memiliki peran, tanggung jawab dan capaian terhadap 25 IGT dengan Status terkompilasi dan terintegrasi seluruhnya (25 IGT).

Matrik Status Capaian Renaksi 25 IGT Lingkup KLHK dalam Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP)

NO	NAMA IGT	PENANGGUNG JAWAB	PEMUTAKHIRAN	STATUS KOMPILASI	STATUS INTEGRASI
1	Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan skala 1:50.000	Dit. RPKHPWPH	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
2	Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPB) skala 1:250.000	Dit. IPSDH	B08 2021 dan B12	Terkompilasi	Terintegrasi
3	Peta Pelepasan Kawasan Hutan skala 1:50.000	Dit. PPKH	B08 2021 dan B12	Terkompilasi	Terintegrasi
4	Peta Penetapan Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Perizinan Berusaha) skala 1:50.000	Dit. FLIPH	B08 2021 dan B12	Terkompilasi	Terintegrasi
5	Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Komunitas skala 1:50.000	Dit. PKPS	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
6	Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa skala 1:50.000	Dit. PKPS	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
7	Peta Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial Skala 1:50.000	Dit. PKPS	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
8	Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000	Dit. PKEG	B08 2021 dan B12 setiap ada perubahan	Terkompilasi	Terintegrasi
9	Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000	Dit. PKEG	B08 2021 dan B12 setiap ada perubahan	Terkompilasi	Terintegrasi
10	Peta Rawan Erosi skala 1:50.000	Dit. PPPDAS	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
11	Peta Lahan Kritis skala 1:50.000	Dit. PPPDAS	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi

NO	NAMA IGT	PENANGGUNG JAWAB	PEMUTAKHIRAN	STATUS KOMPILASI	STATUS INTEGRASI
12	Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan skala 1:250.000	Dit. PKHL	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
13	Peta Mangrove Nasional skala 1:50.000 - 1:250.000	Dit. RPOM	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
14	Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDTLH) minimal skala 1:50.000	Dit. POLKWS	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
15	Peta Pemantauan Sampah Laut skala 1:250.000	Dit. PPKPL	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
16	Peta Penetapan Kawasan Hutan pada skala 1:100.000 - 1:50.000	Dit. PPKH	B03, B06, B09, B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
17	Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan minimal pada skala 1:50.000	Dit. BLPH	B08, B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
18	Peta Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat skala 1:50.000	Dit. PKPS	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
19	Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000	Dit. RPKHPWPH	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
20	Peta Hutan Adat, Minimal pada skala 1 : 50.000	Dit. PKTHA	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
21	Peta Penunjukkan Kawasan Hutan skala 1:250.000	Dit. PPKH	B12 setiap tahun atau setiap ada penetapan baru	Terkompilasi	Terintegrasi
22	Peta Indikatif Pengawasan Perizinan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan minimal skala 1:50.000	Dit. PPKH	B08, B12 setiap ada perubahan/penetapan baru	Terkompilasi	Terintegrasi
23	Peta Neraca Sumber Daya Hutan skala 1:250.000	Dit. IPSDH	B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
24	Peta DAS skala 1:50.000 (Klasifikasi DAS)	Dit. PPPDAS	B08, B12 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi
25	Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000	Dit. PKK	B09 setiap tahun	Terkompilasi	Terintegrasi

Direktorat IPSDH secara aktif berkoordinasi dengan Produsen DG yang bertanggungjawab terhadap IGT dimaksud, kemudian menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG selaku Ketua Satuan Tugas 1 Sekretariat KSP mengenai capaian target renaksi 25 IGT KLHK yang masuk dalam Renaksi KSP.

One Map Policy Summit

Berkenaan dengan 8 (delapan) tahun Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan sebagai upayapenyebaran penting Kebijakan Satu Peta yang berkelanjutan untuk mendukung percepatan pembangunan nasional, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta menyelenggarakan One Map Competition sebagai rangkaian kegiatan *One Map Policy Summit 2024*. *One Map Policy for Better Governance* merupakan salah satu cabang *One Map Competition*, memperlombakan produk kebijakan dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah memberikan manfaat dan dampak signifikan penggunaan produk Kebijakan Satu Peta dalam mendukung tata kelola dan program strategis di lingkungan pemerintah.

Berdasarkan hasil penilaian, instansi yang Bapak pimpin berhasil memenangkan kompetisi One Map Policy for Better Governance. Sesuai dengan hasil tersebut KKLHK memperoleh 2 (dua) penghargaan pada kategori **Juara One Map Policy Competition : One Map Policy for Better Governance** dan **Juara Capaian Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Terbaik Tahun 2024**.

Bhumandala Award Tahun 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor B-17.4/KA-BIG/IIG.02.02/7/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Kegiatan Penganugerahan Bhumandala Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Tahun 2024, bahwa pada tahun 2024, Kementerian LHK berhasil memenangkan 3 (tiga) tema utama yaitu Penghargaan **Bhumandala Kanaka/Emas Informasi Geospasial Tematik (IGT), Bhumandata Kanaka/Emas Simpul Jaringan dan Bhumandala Kanaka/Emas Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik**.

Bhumandala Simpul JIG menyertakan 5 (lima) kriteria penilaian yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Teknologi, Standar Data dan IG serta Sumber Daya Manusia Bidang Penyelenggaraan IG. Sedangkan Bhumandala Penyelenggaraan IGT menyertakan 8 (delapan) kriteria yaitu Ketersediaan IGT, Standar, Implementasi Standar, Kontrol Kualitas, Struktur Data, Metadata, Penyebarluasan IGT dan Kontrol Kualitas.

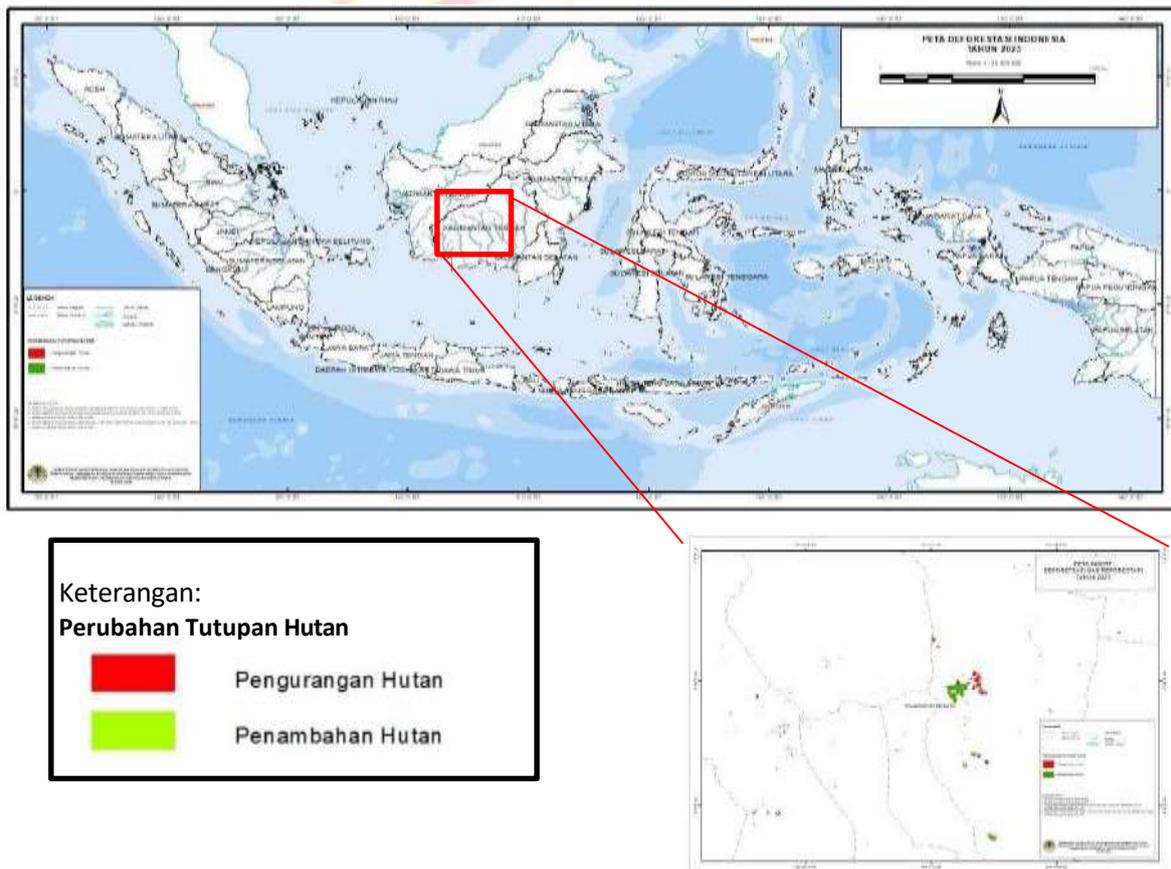
4. IKK Data dan Informasi Deforestasi

Tabel 33. Realisasi Pelaksanaan IKK Data dan Informasi Deforestasi

Sasaran Kegiatan	Rincian Output	Unit Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %
Tersedia dan termutakhirnya data dan informasi SDH	Data dan Informasi Deforestasi	Pegolahan Data Deforestasi Indonesia	1 Dokumen	1 Dokumen	100

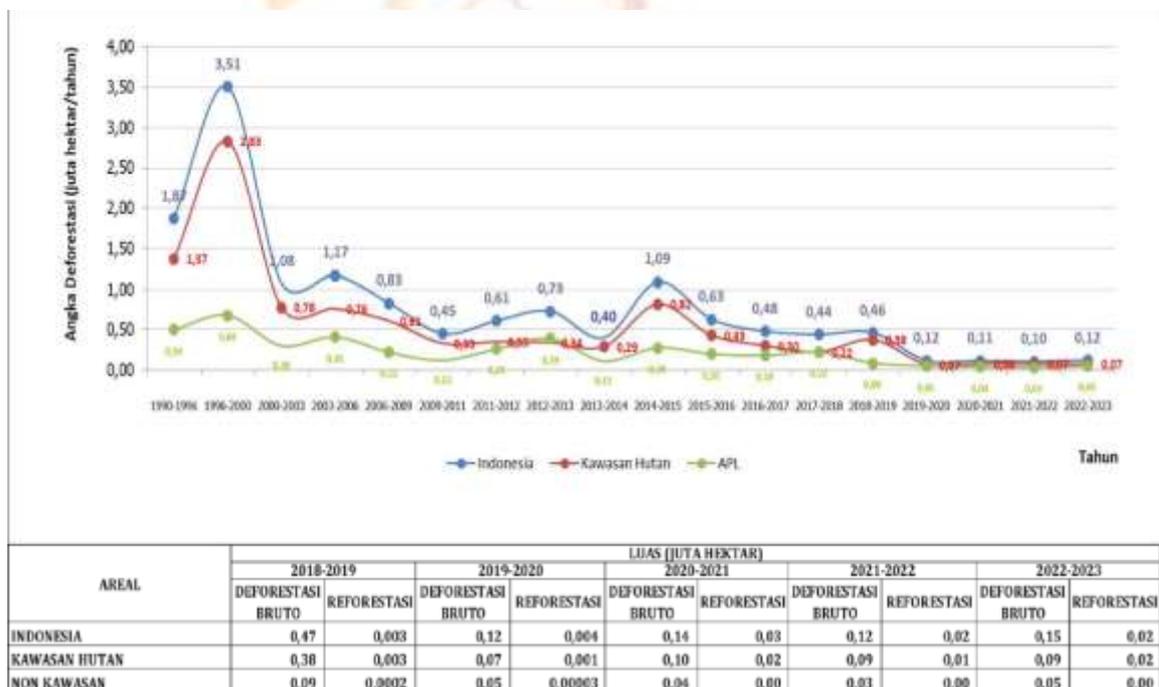
Tabel 34. Progres Pelaksanaan IKK Data dan Informasi Deforestasi

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	TAHUN 2024		REALISASI		KETERANGAN PROGRES
				TGT	SAT	REA	SAT	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Deforestasi	1	Dokumen	1	Dokumen	Telah disusun Buku Deforestasi Indonesia Tahun 2023



Gambar 16. Peta Deforestasi Indonesia Tahun 2023

Perkembangan Deforestasi Indonesia telah dihitung secara periodik sejak tahun 2000 dengan data pengamatan mulai tahun 1990. Metode yang diterapkan pada perhitungan deforestasi mengalami perkembangan sejak tahun tersebut. Pada awalnya, kegiatan hanya memperhitungkan luasan penutupan hutan yang hilang (deforestasi bruto). Kemudian, mulai periode 2011-2012 perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan reforestasi. Deforestasi Indonesia sejak pengamatan tahun 1990 selalu mengalami fluktuasi akibat pengaruh berbagai hal, mulai dari aktivitas manusia, kondisi alam, dsb. Besaran deforestasi tertinggi terjadi pada periode 1996-2000 (yang dipicu oleh kebakaran besar di Kalimantan Timur yang bertepatan dengan periode *El-Niño* pada masa itu). Pada periode selanjutnya deforestasi cenderung mengalami penurunan. Penurunan angka deforestasi terendah terjadi pada periode 2019-2020 yaitu sebesar 75,03%. Penurunan terbesar terjadi pada jenis hutan tanaman. Periode 2018-2019, deforestasi pada hutan tanaman seluas 275,8 ribu hektar sedangkan periode 2019-2020 deforestasi pada hutan tanaman memiliki nilai sebesar negatif 1,2 ribu ha. Deforestasi Netto pada periode 2020- 2021 terjadi penurunan 1,7 %, sedangkan untuk deforestasi bruto terjadi kenaikan sebesar 16,8 %. Sedangkan Deforestasi Netto Tahun 2021-2022 terjadi penurunan 8,4 %, begitu juga untuk deforestasi bruto mengalami penurunan sebesar 14,1 %.



Gambar 17. Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990 – 2023

Deforestasi Netto Indonesia tahun 2023 sebesar 121,1 ribu ha (di dalam dan di luar kawasan hutan). Luas tersebut sama nilainya dengan deforestasi bruto sebesar 145,4 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 24,3 ribu ha. Deforestasi Netto di dalam kawasan hutan sebesar 72,2 ribu ha (59,6%), sedangkan di luar kawasan hutan (APL) sebesar 48,9 ribu ha (40,4%). Berdasarkan tipe hutan, deforestasi Netto tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 124,6 ribu ha, di mana 76,9 ribu ha berada di dalam kawasan hutan dan sisanya seluas 47,4 ribu ha berada di luar kawasan hutan. Luas Deforestasi pada tipe Hutan Sekunder lebih besar dibandingkan dengan deforestasi netto Indonesia, dimana terdapat luasan reforestasi pada hutan tanaman.

Deforestasi Netto Hutan Alam Indonesia tahun 2023 sebesar 133,8 ribu ha (di dalam dan di luar kawasan hutan). Luas tersebut berasal dari Deforestasi Bruto Hutan Alam sebesar 141,3 ribu ha dikurangi dengan Reforestasi Hutan Alam sebesar 7,5 ribu ha. Deforestasi Netto Hutan Alam di dalam kawasan hutan sebesar 84,6 ribu ha (63,2%), sedangkan di luar kawasan hutan (APL) seluas 49,2 ribu ha (36,8%). Berdasarkan tipe hutan, Deforestasi Netto Hutan Alam di hutan sekunder lebih tinggi dibandingkan di hutan primer yaitu seluas 124,6 ribu ha.

Berdasarkan tipe hutan, deforestasi bruto tertinggi terjadi pada tipe hutan sekunder yaitu 132,1 ribu ha, reforestasi tertinggi terjadi pada tipe hutan tanaman juga yaitu 16,9 ribu ha dan deforestasi netto tertinggi terjadi pada hutan sekunder yaitu 124,6 ribu ha.

Deforestasi Netto per fungsi kawasan hutan pada kawasan HK sebesar 4,5 ribu ha (3,7%); HL sebesar 6,1 ribu ha (5,0%); Hutan Produksi sebesar 61,6 ribu ha (50,8%) yang terdiri atas : HPT sebesar 17,5 ribu ha (14,4 %); HP sebesar 38,3 ribu ha (31,6%); HPK sebesar 5,8 ribu ha (4,8%). Deforestasi Netto di luar kawasan hutan atau APL sebesar 48,9 ribu ha (40,4%).

Deforestasi Netto Hutan Alam di dalam kawasan hutan pada kawasan HK sebesar 4,5 ribu ha (3,4%); HL sebesar 6,1 ribu ha (4,5%); Hutan Produksi sebesar 74,0 ribu ha (55,3%) yang terdiri atas : HPT sebesar 18,0 ribu ha (13,4 %); HP sebesar 50,3 ribu ha (37,6%); HPK sebesar 5,8 ribu ha (4,3%). Deforestasi Netto Hutan Alam di luar kawasan hutan atau APL sebesar 49,2 ribu ha (36,8%).

Berdasarkan pulau/kepulauan besar, Deforestasi Netto tertinggi berturut-turut terjadi di Pulau Kalimantan sebesar 67,6 ribu ha (55,9%), Sumatera

sebesar 36,9 ribu ha (30,5%), dan Pulau Sulawesi sebesar 6,4 ribu ha (5,3%).

Berdasarkan provinsi, Deforestasi Netto tertinggi pada fungsi HK adalah provinsi Riau (2,6 ribu ha) sementara pada fungsi HL adalah Aceh (1,2 ribu ha). Deforestasi tertinggi pada fungsi Hutan Produksi terdiri atas Provinsi Riau (5,3 ribu) untuk fungsi HPT, Provinsi Kalimantan Timur (12,7 ribu ha) untuk fungsi HP, dan Provinsi Sumatera Barat (1,1 ribu ha) untuk fungsi HPK. Sedangkan untuk APL tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur Seluas 10,8 ribu ha.

Sebagai perbandingan sistim nasional dengan sistim global, analisa data NFMS juga memperhatikan data *independent* yang dikeluarkan oleh GLAD (*Global Land Analysis and Discovery*) dari *University of Maryland*, yang menjadi sumber informasi dan rujukan data *tree-cover loss* serta deforestasi tahunan pada level global. Dalam hal ini data NFMS sejalan dengan data yang dipakai tingkat global, yang menyatakan bahwa Indonesia secara *gradual* telah mampu menurunkan tingkat kehilangan hutan sejak tahun 2003, terutama pada tiga tahun terakhir, dengan puncaknya tahun 2018-2019. Tahun 2018-2019, pada tingkat global Indonesia menjadi satu-satunya negara tropis yang mengalami penurunan laju deforestasi, dimana negara lainnya bahkan mengalami peningkatan drastis untuk laju deforestasi.

Penggambaran hasil sistim nasional NFMS terhadap referensi global menjadi sangat penting pada saat Indonesia menjadi bagian dari ratifikasi *Paris Agreement* (Perjanjian Paris) untuk perubahan iklim (UU 16 tahun 2016). Sejalan dengan komitmen tersebut, Indonesia juga tidak terlepas dari urusan *measuring, reporting and verification* (MRV) yang menjadi standard global dalam menilai kehandalan data dan sistim informasi yang dipakai dalam urusan pelaporan internasional. Salah satu kelebihan Indonesia, semua pelaporan internasional yang dilakukan untuk urusan hutan, baik untuk *channeling Global Forest Resources Assessment (GFRA)*, *National Communication* dan *Biennial Update Report (BUR)*, sudah menggunakan satu data deforestasi, yang bersumber dari sistim nasional NFMS.

Pemantauan Hutan Nasional vs Pemantauan Hutan Global

Indonesia bukan satu-satunya negara yang melaksanakan pemantauan hutan terhadap wilayah Indonesia. Ada organisasi lain yang turut serta melakukan pemantauan hutan terhadap wilayah Indonesia, antara lain yang dilaksanakan oleh University of Maryland, College Park (UMD). Hasil pemantauan global terhadap hutan dinamakan *Global Land Analysis and Discovery* (GLAD) dipublikasikan setiap tahun. GLAD hanya membagi hasil klasifikasi dengan dua kelas (hutan dan bukan hutan), berbeda dengan Indonesia yang mempergunakan 23 kelas penutupan lahan. Hasil GLAD ini dipublikasikan dalam bentuk *Tree Cover Loss*. Hasil ini lebih bersifat untuk publikasi ilmiah dan kepentingan *scientific*.

Pada perkembangannya data GLAD secara nasional diambil alih oleh organisasi internasional, yaitu *Global Forest Watch* (GFW) yang dieksekusi oleh *World Resource Institute* (WRI); dan menjadi

salah satu portal global yang paling banyak diakses oleh publik dunia. Yang menjadi permasalahan, hasil telaah perubahan penutupan lahan yang ada (*Tree Cover Loss*), kemudian dipublikasikan GFW sebagai Deforestasi. Disinilah kemudian timbul masalah, karena besaran hasil telaahnya jauh lebih besar dari hasil telaah Indonesia. Dalam hal ini besaran tutupan areal hutannya (*Tree cover*) juga lebih besar daripada data Indonesia, karena memasukkan juga kelas-kelas belukar tua, juga perkebunan campur seperti *jungle rubber*, atau areal kebun buah-buahan campur dan sawit. Akibatnya apabila ada perubahan dalam kelas-kelas tutupan yang bagi Indonesia bukan masuk kategori hutan, oleh GFW dikategorikan sebagai deforestasi. Hal ini tentu saja menjadi salah satu kerugian bagi Indonesia. *Tree Cover loss* dari *Global Land Analysis and Discovery* yang juga diambil dan dipublikasikan oleh GFW disajikan pada gambar berikut.



Gambar 18. Gambar *Tree Cover loss* dari *Global Land Analysis and Discovery* yang juga dipakai untuk kampanye dan publikasi oleh *Global Forest Watch*

Pembahasan dan komunikasi yang lebih baik dan intensif dengan GFW, juga dengan *University of Maryland* (sebagai pembangun metodologi), masih perlu dilakukan lebih lanjut oleh KLHK c.q. Direktorat IPSDH, mengingat bahwa kriteria-kriteria lokal yang dipakai oleh Indonesia, harus terus diketahui, dipahami dan diakui oleh pihak-pihak internasional atau global. Kegiatan ini perlu dilakukan secara rutin dan sistematis, mengingat bahwa pihak-pihak global juga terus berganti-ganti pengelola dan ekspert; dan data GFW banyak dipakai sebagai acuan negara-negara maju untuk isu perubahan iklim dan perdagangan internasional.

Table 35. Contoh perbandingan data luas hutan Indonesia berdasarkan kriteria nasional dan kriteria global yang dipergunakan oleh EU (data EU menggunakan data global yang sejalan data GFW)

Component	Indonesia Forest		EU Forest
	Indonesian definition	EU definition	
	A	B	C
Territorial Area coverage (Mha)	187.8	187.8	422.4
Forested Area coverage (Mha)	94.1	158.7	180.3
Forest coverage (%)	50.13%	84.52%	42.67%
Definition of forest	Forest cover: 30% tree canopy cover (area > 6,25ha)	Forest cover: 10% tree canopy cover + other wooded land (5% tree canopy cover)	
Definition of deforestation	Change from forested class to non-forested class	Deforestation + Forest Degradation	

5. IKK Nilai SAKIP Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Salah satu Indikator Kinerja pada Tahun 2024 adalah Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 83 poin. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) kompone evaluasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi: perencanaan kinerja; pengukuran kinerja; pelaporan kinerja; dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Ditjen PKTL Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tahun 2024, Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar 83 dengan Predikat A (Memuaskan). Predikat tersebut bermakna bahwa Ditjen PKTL telah berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Realisasi hasil penilaian Tahun 2023 ini berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 83 Poin.

Tabel 36. Matriks Hasil Evaluasi Akuntabilitas Ditjen PKTL Tahun 2023

No	Komponen/ Sub Komponen/ Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
			2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.30	25.08	25.13
2	Pengukuran Kinerja	30.00	23.08	23.85	24.64
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.46	12.04	12.40
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	18.00	18.31	20.83
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76.64	79.29	83.00
			BB	BB	A

Ditjen PKTL memperoleh nilai sebesar 83.00 dengan Predikat A (Memuaskan) meningkat 3.71 dari nilai AKIP tahun 2022 yaitu 79.29. Berbagai rekomendasi umum yang menjadi catatan pokok Tim Inspektorat Jenderal KLHK menjadi perhatian untuk menghindari pengulangan kesalahan dan penyempurnaan dokumen-dokumen pada masa yang akan datang, sehingga nilai SAKIP Eselon I sebesar 80 yang menjadi target di tahun 2024 dapat tercapai.

6. IKK Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Dalam mengawal penerapannya di tingkat satker, setiap Eselon I bertugas melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap satker lingkup unit kerjanya. Pembinaan yang dimaksud antara lain berupa bimbingan teknis, konsultasi, dan evaluasi. Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk perjalanan dinas ke Satker UPT yang diawali dengan penelaahan dokumen penyelenggaraan SPIP yang tersedia, disertai dengan pemberian arahan, masukan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban (pelaporan). Monitoring dan evaluasi juga dilakukan terhadap ketertiban penyampaian desain penyelenggaraan SPIP, laporan triwulan, serta laporan tahunan dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Berdasarkan monitoring yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2024, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menerapkan SPIP di lingkungan kerjanya dengan didukung dokumen berupa SK Satgas, desain penyelenggaraan dan laporan SPIP. Berdasarkan hasil evaluasi maturitas SPIP yang telah dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan memperoleh total nilai 4,10.

Tabel 37. Hasil Penilaian Penyelenggaraan SPIP Tahun 2023

NO	PENILAIAN	PENILAIAN MANDIRI		PENJAMINAN KUALITAS	
		NILAI	LEVEL	NILAI	LEVEL
1	NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	4.180	4	4.1	4
2	NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)	4.600	4	4.5	4
3	NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)	5.000	5	4.2	4

7. IKK Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel

Berdasarkan data tarikan dari aplikasi <https://sakti.kemenkeu.go.id>, realisasi anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp 20.577.338.402,- atau mencapai 99,50% dari total pagu Rp21.193.840.000,-

Realisasi tersebut terdiri atas belanja barang sebesar Rp8.865.436.562,- dan belanja modal sebesar Rp11.711.901.840,- dengan komposisi sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp3.683.660.167,- dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp16.893.678.235,-

F. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 21.193.840.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan total realisasi anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp20.577.338.402,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) atau sebesar 99,83%.

Alokasi anggaran Tahun 2024 guna menunjang kegiatan operasional dan non-operasional yang dilaksanakan oleh Direktorat IPSDH. Pembagian pagu anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Sumber Dana	Pagu	Realisasi s.d 31 Desember 2024	Persen
		Rp	Rp	%
Belanja Barang	RM	2.215.632.000	2.203.347.167	99.44
	PN	6.682.453.000	6.662.089.395	99.69
Belanja Modal	RM	1.480.313.000	1.480.313.000	100.00
	PN	10.233.318.000	10.231.588.840	99.82
<i>Pagu Blokir*</i>		<i>582.124.000</i>		
Jumlah		21.193.840.000	20.577.338.402	99.83

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 Nopember yang berisi instruksi untuk memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar minimal 50% untuk tahun anggaran 2024. Direktorat IPSDH telah melakukan upaya efisiensi anggaran berupa pemangkasan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp582.124.000. Pemangkasan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024.

Dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 dan guna optimalisasi kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran, Direktorat IPSDH melakukan beberapa kali perubahan/revisi dalam rencana anggaran pada Dokumen DIPA. Dengan perubahan penambahan/pengurangan anggaran sebagai berikut:

Tabel 39. Alokasi Anggaran 2024 setelah Revisi

KRO	Rincian Output (RO)	Target RO			Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5434. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan						
5434.BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1	2	Dokumen	8.383.344.000	845.482.000
	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1	1	Layanan	1.700.000.000	4.695.663.000

KRO	Rincian Output (RO)	Target RO			Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	005-Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	2	Layanan	400.000.000	400.000.000
	006-Data dan Informasi Deforestasi	1	1	Layanan	250.000.000	4.271.929.000
	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2	1	Layanan	275.000.000	7.482.630.000
5432. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						
5432.EBA	962. Layanan Umum	1	1	Layanan	650.000.000	2.922.566.000
Layanan Dukungan Manajemen Internal	994. Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	575.570.000	575.570.000
TOTAL ANGGARAN					12.233.914.000	21.193.840.000

Pagu dan realisasi keuangan per Sub Direktorat lingkup Direktorat IPSDH Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40. Realisasi Anggaran Per-Sub Direktorat Tahun 2024

SUB DIREKTORAT/ SUB BAGIAN	PAGU TAHUN 2024	REALISASI s.d DESEMBER 2024		FISIK %	DEVIASI
		Rp	%		
PSDH	10.259.975.000	10.259.114.886	99,99	100,00	0,01
JIGLHK	4.600.745.000	4.600.667.478	100,00	100,00	0
TU	5.750.996.000	5.717.556.038	99,42	100,00	0,58
Blokir*	582.124.000				
JUMLAH	21.193.840.000	20.577.338.402	99,83	100,00	0,17

.Tabel 41. Pagu DIPA dan Realisasi Keuangan Per Kegiatan/ Output/ Sub Output lingkup
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2024

No/Kode MAK	IKK/KRO/RO/Unit Kegiatan (Komponen)	Anggaran(Rp)	Realisasi Keuangan		Rea. Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN		20.611.716.000	20.577.338.402	99,83	100,00
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	17.170.900.000	17.168.861.204	99,97	100,00
5434	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	17.170.900.000	17.168.861.204	99,99	100,00
5434.BMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	17.170.900.000	17.168.861.204	99,99	100,00
5434.BMA.001	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	845.482.000	845.389.656	99,99	100,00
051	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	322.198.000	322.152.185	99,99	100,00
052	Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	523.284.000	523.237.471	99,99	100,00
5434.BMA.004	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	4.600.745.000	4.600.667.478	100,00	100,00
051	Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik LHK yang Terintegrasi dengan Portal Nasional	4.600.745.000	4.600.667.478	100,00	100,00
5434.BMA.005	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Pergunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	400.000.000	400.000.000	100,00	100,00
051	Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif	300.000.000	300.000.000	100,00	100,00
052	Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
5434.BMA.006	Data dan informasi deforestasi	3.842.043.000	3.840.290.770	99,95	100,00
051	Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	3.842.043.000	3.840.290.770	99,95	100,00
5434.BMA.007	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya	7.482.630.000	7.482.513.300	100,00	100,00

No/Kode MAK	IKK/KRO/RO/Unit Kegiatan (Komponen)	Anggaran(Rp)	Realisasi Keuangan		Rea. Fisik
			(Rp)	(%)	(%)
	Hutan				
051	Penyusunan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	7.482.630.000	7.482.513.300	100,00	100,00
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen	3.440.816.000	3.408.477.198	99,06	100,00
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3.440.816.000	3.408.477.198	99,06	100,00
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	3.440.816.000	3.408.477.198	99,06	100,00
5432.EBA.962	Layanan Umum	2.865.246.000	2.853.051.041	99,57	100,00
061	Layanan Dukungan Management Direktorat IPSDH	2.865.246.000	2.853.051.041	99,57	100,00
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	575.570.000	555.426.157	96,50	100,00
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	575.570.000	555.426.157	96,50	100,00
Total		20.611.716.000	20.577.338.402	99,83	100,00

Perkembangan realisasi penyerapan anggaran yang terjadi pada 5 (lima) tahun terakhir terlihat pada grafik berikut:



Gambar 33. Grafik Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

G. PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA

1. Prestasi dan Inovasi

Terkait dengan pembangunan ZI, prestasi dan penghargaan Direktorat IPSDH dalam melayani Masyarakat selama periode tahun 2020-2023:

- a. SIMONTANA sebagai Pemenang TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020;
- b. Bhumandala Rajata Award (Perak) sebagai simpul jaringan terbaik Tahun 2020 dengan BIG sebagai penyelenggara;
- c. BIG TOP Geospasial Data Sharing Kategori K/L Tahun 2021;
- d. SIGAP meraih Bhumandala Kanaka (kategori emas) 2022 dan 2023 (Simpul Jaringan Terbaik dan Inovasi Pemanfaatan IG);
- e. Indonesia SDGs Award 2022 (Simontana);
- f. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) sesuai Surat Keputusan Menpan RB Nomor 1472 Tahun 2021.

2. Branding

Branding dilakukan untuk membuat pemahaman publik yang lebih baik tentang Direktorat IPSDH, termasuk memahami peran dan tugas serta tanggungjawabnya. Terkait dengan branding ini dipergunakan beberapa *tools* yang difokuskan untuk membuat familier beberapa produk kongkrit Direktorat IPSDH. Logo branding Direktorat IPSDH ditampilkan berikut:



SI APIS

Lebah Apis menjadi ikon SIGAP (Sistim Informasi Geospasial LHK) yang merupakan portal utama untuk Tata Kelola Data dan Informasi Geospasial lingkup Kehutanan dan Lingkungan Hidup



SI BINO

Burung hantu Bino menjadi ikon untuk *National Forest Monitoring System* atau Sistim Monitoring Hutan Nasional alias Simontana. Sistim ini mengoptimalkan SIGAP

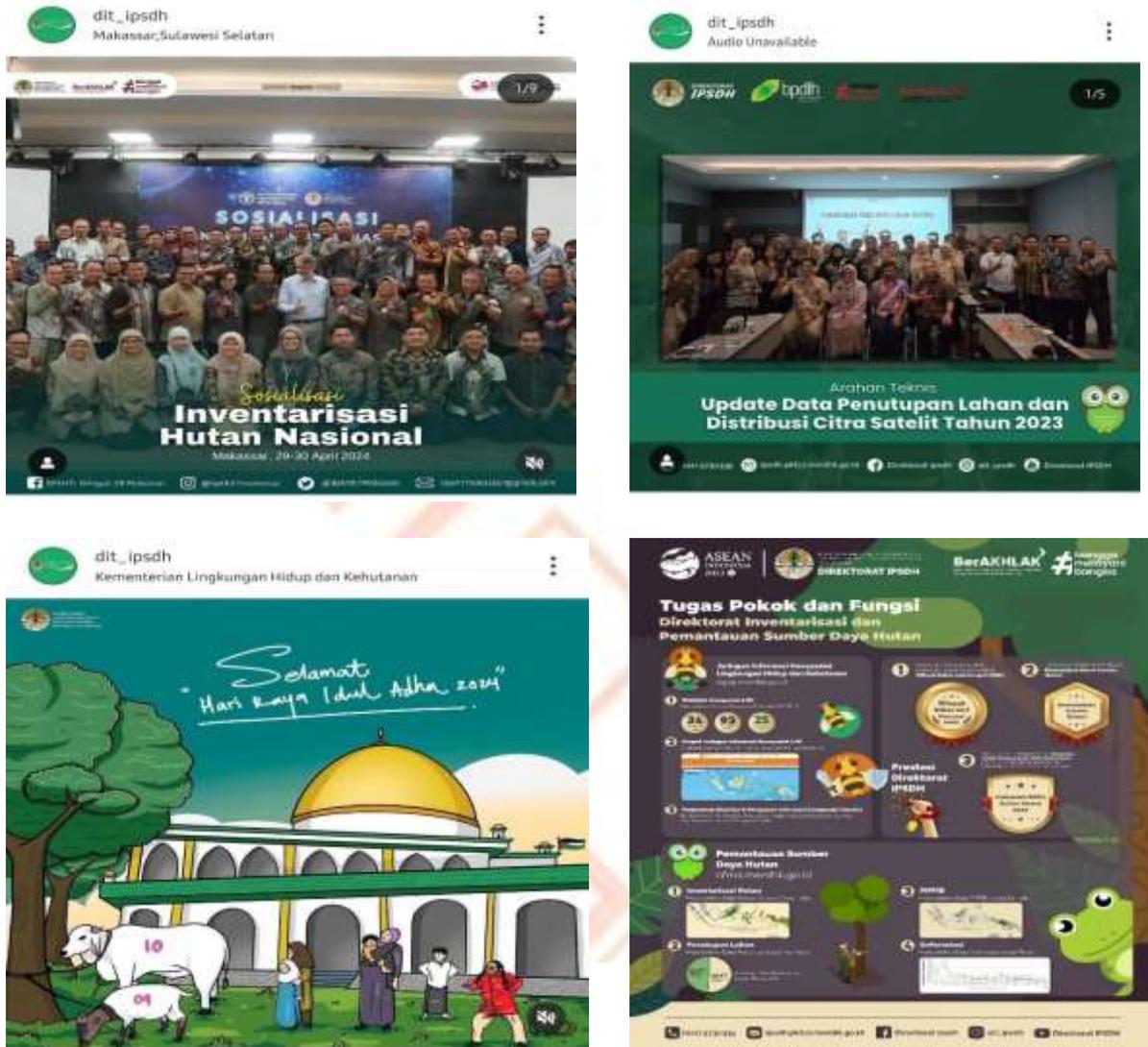


SI TAKHI

Kodok Takhi menjadi ikon untuk sistim untuk Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut atau PIPPIB. Semua data dan informasi geospasialnya mengoptimalkan SIGAP LHK

Gambar 19. Logo Branding Direktorat IPSDH

Diluar ketiga ikon yang dipilih di Direktorat IPSDH, juga ada satu ikon lagi yang saat ini sedang dalam taraf pembahasan, yaitu ikon untuk sistem Inventarisasi Hutan Nasional. Masih dalam kaitan dengan branding, juga ditetapkan Tim Media Sosial yang difokuskan pada para anggota muda di Direktorat IPSDH. Tim Medsos ini juga diarahkan untuk terus mengembangkan diri secara terus menerus, baik melalui pelatihan formal maupun mandiri.



Gambar 20. Beberapa produk yang dikeluarkan Tim Medsos Direktorat IPSDH

Dengan Melakukan Pembangunan Zona Integritas melalui perubahan dan inovasi yang dilakukan serta penerapan 6 area perubahan, Direktorat IPSDH siap menjadi satker menuju WBBM dan berkomitmen untuk terus melayani masyarakat dengan sebaik baiknya. Namun demikian pada tahun 2024, Direktorat IPSDH belum berhasil untuk mendapatkan predikat WBBM, sehingga evaluasi dan perbaikan yang diperlukan, perlu segera dilakukan

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menunjukkan bahwa capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 100%, sama dengan capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan Tahun 2023. Sedangkan efisiensi capaian kinerja tahun 2024 bernilai 0.17 yang menunjukkan efisiensi dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, capaian fisik lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendapatkan capaian fisik tersebut.

Berdasarkan skala pengukuran ordinary yang dipergunakan dalam penilaian perolehan persentase pencapaian kinerja keluaran (output), seluruh kegiatan dan sasaran tercapai 100%, sehingga berada pada skala ordinari 85% - 100% dengan kriteria kinerja *sangat baik*.

B. LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan penambahan SDM sesuai dengan beban kerja;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan lingkup Direktorat;
3. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan;
4. Peningkatan kerjasama dengan para pihak terkait guna mendukung peningkatan capaian sasaran strategis;
5. Perencanaan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien;
6. Memaksimalkan penggunaan anggaran untuk peningkatan kualitas hasil kegiatan;
7. Komunikasi dan koordinasi intensif antara pimpinan dengan seluruh jajaran dan staf perlu terus dilakukan, guna membangun rasa kebersamaan dan kebanggaan bersama sebagai salah satu unit unggul dalam berbagai inovasi teknologi serta peraih predikat WBK;
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas DG-IGT KLHK terutama sektor lingkungan hidup, guna menjamin bahwa data dan informasi geospasial hutan tropis Indonesia dapat dipercaya, memenuhi kriteria transparansi, akurat dan terkini.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.

Jabatan : Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.
NIP. 19690114 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
ESELON II : DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		
				SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi sumber daya hutan	Data dan peta kondisi sumber daya hutan dan Kawasan hutan	3	3	Dokumen
			Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2	2	Laporan
			Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	2	SK dan Peta
			Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	1	1	Dokumen
			Tersedianya layanan informasi dan analisis geospasial tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1	1
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	80	80	Poin
			Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
			Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen
		Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai Kinerja Anggaran pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	98,29	82,5	Poin

KRO	Rincian Output (RO)	Target RO			Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5434. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan						
5434.BMA- Data dan Informasi Publik	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1	1	Dokumen	8.383.344.000	845.482.000
	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1	1	Layanan	1.700.000.000	4.695.663.000
	005-Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	2	Layanan	400.000.000	400.000.000
	006-Data dan Informasi Deforestasi	1	1	Layanan	250.000.000	4.271.929.000
	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	2	2	Layanan	275.000.000	7.482.630.000
5432. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						
5432.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	962. Layanan Umum	1	1	Layanan	650.000.000	2.922.566.000
	994. Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	575.570.000	575.570.000
TOTAL ANGGARAN					12.233.914.000	21.193.840.000
TOTAL BLOKIR						

Jakarta, Desember 2024

Plt. Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

Direktur Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan,



Erik Teguh Primiantoro, S.Hut., MES.
NIP. 19690114 199603 1 001



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA